



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PEMERINTAH ACEH

HIKAYAT ACEH TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



Diterbitkan atas kerjasama

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pemerintah Aceh

**HIKAYAT ACEH
TENTANG
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

TIDAK DIPERJUAL-BELIKAN





Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia



Pemerintah Aceh

**HIKAYAT ACEH
TENTANG
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

Pengubah Hikayat
Fuadi Zulkifli
dan
Mohd. Kalam Daud

Diterbitkan atas kerjasama

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pemerintah Aceh

Panitia Penyusunan Hikayat Aceh Tentang UUD 1945,
Hikayat Aceh Tentang Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Jakarta-Banda Aceh: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI-
Pemerintah Aceh.
Cetakan Pertama, September 2009
xxviii + 66 halaman; 15,6 x 22 cm

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All right reserved

Diterbitkan atas Kerjasama

**Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (021) 23529000, Fax. (021) 3520177
PO Box 999 JKT 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemerintah Aceh
Jl. T. Nyak Arief No. 219
Banda Aceh 23114
Telp. (0651) 7551377
Fax. (0651) 7553048
www.nad.go.id

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimuat dalam buku ini merupakan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Satu Naskah yang berasal dari terbitan Sekretariat Jenderal MPR-RI pada tahun 2002. Naskah ini merupakan rangkuman Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945, naskah Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

DARI PENERBIT

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelancaran dan kekuatan sehingga buku *Hikayat Aceh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* ini dapat terbit. Naskah buku ini disusun atas kerja sama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry dan diterbitkan atas kerja sama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI dan Pemerintah Aceh.

Gagasan buku ini berawal dari prakarsa Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI yang telah dan terus menyelenggarakan program penyebarluasan informasi mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dengan pendekatan kultural. Beberapa realisasi program ini antara lain penerjemahan UUD 1945 ke dalam beberapa bahasa daerah, pengalihaksaraan ke dalam huruf Arab Pegon, penerjemahan dan pengalihbahasaan UUD 1945 ke bahasa Arab dan bahasa Mandarin. Dengan program ini diharapkan UUD 1945 menjadi dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari dan lebih mudah dipahami masyarakat Indonesia yang masih banyak berfikir dan berbicara dalam bahasa daerah atau bahasa asing yang hidup dan berkembang di tanah air, seperti bahasa Arab dan bahasa Mandarin.

Program ini diselenggarakan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI dengan pertimbangan bahwa hal itu sangat dekat dan menjadi wujud dukungan pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Fungsi tersebut akan dapat dilaksanakan secara optimal manakala konstitusi dipahami secara memadai dan menjadi bahan perbincangan sehari-hari masyarakat dan aparaturnya penyelenggara negara.

Terkait dengan kegiatan penerjemahan UUD 1945 ke dalam bahasa Aceh, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI menjalin kerja sama dengan IAIN Ar-Raniry, khususnya Fakultas Syari'ah, untuk melaksanakan program penerjemahan UUD 1945 ke dalam bahasa Aceh. Dalam perkembangannya, program ini ditingkatkan derajatnya menjadi program penyusunan Hikayat Aceh tentang UUD 1945 dengan pertimbangan bentuk hikayat masih sangat berperan dan hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh. Selanjutnya kedua lembaga membentuk Panitia Penyusunan Hikayat Aceh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk didalamnya penggubah hikayat Saudara Fuad Zulkifli dan Saudara Mohd. Kalam Daud.

Agar naskah hasil kerja panitia dapat lebih baik, kedua lembaga menyelenggarakan Lokakarya Hikayat Aceh tentang UUD 1945 dengan peserta yang dipandang memiliki kompetensi di bidangnya dan dapat menyempurnakan hasil kerja tim. Para peserta

terdiri dari para budayawan, sastrawan, dosen (termasuk dosen fakultas hukum/syariah), ulama, ahli bahasa, dan tokoh adat berjumlah 50 orang di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh pada 2-4 Mei 2008 yang lalu. Lokakarya tersebut sangat efektif untuk membahas, mengkritisi, dan menyempurnakan naskah hikayat tersebut sehingga dihasilkan naskah hikayat yang lebih sempurna. Dalam forum lokakarya tersebut, dibentuk dua tim yang membahas naskah hikayat secara lebih fokus, yaitu tim substansi dan tim bahasa yang bekerja secara sinergis.

Selanjutnya naskah hasil kerja tersebut diproses untuk naik cetak. Dalam hal pencetakan naskah hikayat ini, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menjalin kerja sama dengan Pemerintah Aceh. Partisipasi Pemerintah Aceh dalam program ini diharapkan memberi kekuatan lebih besar bagi tersosialisasinya hikayat ini ke berbagai kelompok masyarakat dan aparat pemerintah di seluruh wilayah Aceh.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Panitia Penyusunan Hikayat Aceh tentang UUD 1945, baik dari Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI maupun dari IAIN Ar-Raniry yang telah dengan penuh ketekunan, kecermatan dan kerja keras menyelesaikan naskah ini, termasuk kepada penggubah hikayat ini, yaitu Saudara Fuad Zulkifli dan Mohd. Kalam Daud. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta Lokakarya Hikayat Aceh tentang UUD 1945 yang telah mencurahkan fikiran dan meluangkan waktunya untuk menyempurnakan konsep Hikayat Aceh tentang UUD 1945 hasil kerja Panitia Penyusunan Hikayat Aceh tentang UUD 1945.

Kami mengharapkan kehadiran buku ini lebih memudahkan dipahaminya UUD 1945 oleh masyarakat Aceh dan aparat pemerintah Aceh karena telah menerapkan pendekatan kultural khas Aceh, yakni melalui hikayat yang sampai saat ini hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Aceh. Dengan pendekatan ini diharapkan memudahkan terbentuknya budaya sadar berkonstitusi bagi warga masyarakat dan aparat pemerintah Aceh di mana sikap, fikiran, dan perilaku mengacu kepada UUD 1945. Pada tahap berikutnya hal ini diharapkan memberi sumbangsih dalam ikhtiar kita bersama sebagai bangsa untuk memperkokoh kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan kita dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Akhirul kalam, kami menyampaikan selamat membaca dan semoga kehadiran buku ini membawa manfaat bagi masyarakat Aceh. Amin ya Robbal Alamin.

Jakarta, 1 September 2009

**Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI**

Pemerintah Aceh

SEULAS KATA PENGUBAH HIKAYAT

Segala puji dan syukur hanya ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmatnya yang tidak pernah henti-hentinya dilimpahkan kepada kita semua. Hanya dengan berzikir dan beribadah serta sujud seraya berdoa lah segala harapan kita akan dikabulkan.

Shalawat beriring salam kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah-Nya ke seluruh jagat raya ini.

Demikian juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, yang telah ikut menyampaikan amanat Allah kepada umat, termasuk di dalamnya para ulama *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin*, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita.

Penghormatan kami kepada seluruh komponen bangsa seantero Nusantara, terutama kepada guru-guru kami dan rekan-rekan setanah air.

Proses penulisan hikayat ini merupakan kebijakan Dekan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry yang menawarkan kepada kami untuk pengubahannya. Tawaran tersebut kami

TUTO SIPATAH NARIT PEUINTAT

Alhamdu lillah ta pujoe Hadharat deungon
nama Zat Tuhan Nyang Ade
Saban ta syukor ateu h dum rahmat
Seureuta nikmat nyang hantom pre-pre
Rateb ngon dike seureuta ibadat
Meunan nyang teupat tiep uroe sabe
Ta lheung ngon jaroe sujud pih meuhat
beutroh ban hajat kasad lam hate

Seulaweu et saleuem keu panghulee umat
nyang ba risalat udep ngon mate
Nyang peutrok Iseulam insan seulamat
nyang bri syafa'at di uroe page

Teuma keu wareh kawom shahabat
nyang sambong amanat nyaw'ong
geusambe

Keupada ulama bandum thabaqat
amanah ka geumat geupeutroh sabe

Teuma keu guree nyang bri meuneumat
ileumee geupeuingat beutatem seumike
Keu Ummi ngon Abu nyang ka beurangkat
do'a kamoe intat sagai hana pre

Nyang mantong udep badan beu sihat
Teutap ibadat pangkai peu ase
Syedara ngon rakan na sidroe sapat
keu kamoe geu ingat jaroe geulambe

Beuampon desya ngon do'a seulamat
muslimin muslimat bandum beusare
Mudah raseuki jeumot lam hareukat
Talo e ta ikat geutanyoe bek cre bre

Amma ba'du kisah kamoe surat
meususon hikayat narit meuke
Pakon tulesan jadeh kamoe rhat
meupeukeuh hajat kisah meucae

sambut baik, tentunya dengan segenap keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang kami miliki. Dalam rentang waktu yang tidak begitu lama, Hikayat UUD 45 ini pun sukses kami wujudkan.

Materi pokok yang kami terjemahkan adalah seputar UUD 45 beserta amandemennya, dengan harapan akan memudahkan pemahaman semua pihak terhadap dasar negara ini. Tentunya dalam pengubahan ini masih banyak sekali terdapat kelemahan dan kekurangannya, baik urutan kata maupun susunan kalimatnya.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta menyumbangkan motivasi dan pikirannya untuk penyempurnaan tulisan ini. Terutama kepada Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry (saat itu) Dr. A Hamid Sarong, S.H., M.H., yang selalu mengutamakan kebaikan dan kebenaran atas prakarsa beliau dalam mewujudkan penulisan yang sudah berada di hadapan kita ini.

Le Dekan Syari'ah bak saboh sa'at
jaroe geuangkat kamoe geulambe
Laju meupeutoe jaroe meumumat
sira geuhunyat meunoe geukheun le

Hai pak Kalam ngon Fuadi na saboh
pakat
ulon harap that beuneutem sambe
Neutulong gubah saboh hikayat
asoe neuradat kisah UUDe

Kamoe meujaweueb ngon hate mangat
meunurot kamoe hemat bek roh
teukeuse
Meubek na saket jaroe bek keurawat
meunyo ka seumpat jeut kamoe ci-tre

Teuma hana trep masa ji lewat
Kamoe peutroh hat janji ka sampe
UUDe 4-5 dilee meusurat
sibagoe meuneumat mula phon lahe

Keu amandemen kisah meusambat
asoe meucatat awai ngon akhe
Amandemen UUDe buhu geunobat
thon 4-5 ta ingat meuho ta peuse

UUDe geubah lagee ban hajat
mangat munasabat ngon jameun meugule
Jameun jimaju han pat tahambat
han jeuet taingat meutuka-take

UUDe 4-5 nibak bab keu ayat
ka le tan teupat laen geupike
Geuamandemen lam sidang mupakat
le Majeulih Rakyat padum go sabe

Kadang nageuboh asoe geugugat
kon saboh ayat jinoe hana le
Jinoe geugantoe kon saboh kalimat
kadang geucupat asoe geuruge

Ayat geutamah meugantoe lipat
bilangan geuseumat deungon ABCe
Ka hase kamoe gubah u dalam hikayat
ka habeh meuradat ka jeut keu cae

Kami berharap tulisan ini dapat bermanfaat, teriring doa semoga kita semua tetap sehat dan diridhai oleh Allah SWT. Kepada semua pihak sangat kami mohon masukan yang konstruktif guna maksimalnya karya kami ini.

Akhirnya, atas segala kekurangan dan keterbatasan kemampuan kami, mohon dimaklumi, karena hanya sejauh inilah kemampuan yang kami punya.

Atas dasar rasa kesatuan dan persatuan, hikayat ini dapat kami rampungkan. Berikut

Teurimong gaseh kamoe meu-intat
jasa meuingat keu mandum sabe
Meusoe nyang tulong watee meusiat
Nyang bri seumangat bukong ngon lahe

Keu Dekan Syari'ah kamoe kheun seulatesat
do'a beusehat baten ngon lahe
A Hamid Sarong nan geuh ka meuhat
Sabe lam taat hana tom bakhe

Geujok ngon buku keu teunpat meuneumat
bek sampe meuliat kamoe meurawe
Kamoe mulai ngon bibi meutat-tat
Get that meukarat bak peu pah ruwe

Keu ummi aneuk miet teuma meuingat
kamoe geurawat sagai tan dige
Meunancit Dianeuk hana ji gugat
Han tom ji hujat ji boh rameune

Keu ureueng edit asoe geuralat
keu ureueng peuteupat bareh beusare
Kamoe kheun do'a tuboh beusehat
beu-Neulhom beureukat le Rabbol Kade

Bak Allah sidroe geutanyoe meutungkat
beuneubri manfa'at keu ureueng rame
Pat-pat na cikok beugeutem peuteupat
rela kamoe ralat hana mustahe

Geutenyoe meusaho timu ngon barat
beusapeue pakat laot darat sampeo
trok u gle

Ngon sabe sibangsa beukayem meuingat
bek sagai meuhujat dawa ngon pake

Meumada ohnoe narit peu-intat
Phet ngon mangat bek that neusampe
Kamoe goh carong tuleh Hikayat
Ileumee dit that cit saboh bate

Leubeh ngon kureung jareung ngon rapat
Peumeu'ah that-that mandum beusare
Kamoe niet lam hate beujeut keu ibadat
Hana meu'ilat meu-ube pade

ini akan kita mulai uraikan isi/kandungannya
semoga melahirkan pemahaman kita yang
lebih jelas dan benar.

Banda Aceh, 1 Juni 2009

Penggubah Hikayat

Fuadi Zulkifli

dan

Mohd. Kalam Daud

Bukon le sayang sibungong langsung
Meukarang sapat bak saboh tangke
Ta mula jinoe keu asoe Hikayat
Ngat sapeu pakat beusaban pike

Banda Aceh, 1 Juni 2009

Penggubah Hikayat

Fuadi Zulkifli

dan

Mohd. Kalam Daud



PENGANTAR WAKIL GUBERNUR ACEH

HABA PEUINTAT WAKI GUBERNUR ACEH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Di dalam Pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dibagi ke dalam wilayah-wilayah yang besar dan kecil. Pembagian ini bertujuan agar dapat menyelenggarakan tugas dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik dan merata dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

Haba lôn pumphôn deungön Bismillah lôn intat peuneugah ke hukôm negara Keu UUD 45 ka lheueh geukisah mangat jimeudrah lé aneuk bangsa

Lam UUD 45 ka lheueh geupeusah lam pasai lapan blah asoe geurika Keu NKRI bagi wilayah ubit ngön luwah meunurôt jeumba

Mangat geujak buet bak mat peurintah tugaih geuseurah ka meusoe keurija Nanggroe geubangun ka meuri daèrah masyarakat geupapah ka meutöh rupa

Geuatô beujroh mangat siarah beugöt geupapah bandum beurata Masyarakat adé makmu meulimpah tujuan ka geusah uléh negara

Bak atôran tamumat meunan geupeugah meunan isyarah lam Pancasila Lam UUD 45 jeulaih geusurah tapham beuceudah tacok ngön makna

UUD 1945 sebagai GrundNorm harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat agar mereka dapat menjadikannya sebagai rujukan dan pertimbangan hukum dalam setiap tindakan yang ingin mereka kerjakan snantiasa mendasari pada hukum dasar ini. Selama ini terkesan bahwa para penyelenggara pemerintahan kurang dapat mensosialisasikan UUD 1945 ke seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat dapat memahaminya dengan baik. Untuk memberi pemahaman itu kepada seluruh lapisan masyarakat menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak. Banyak cara yang dapat dilakukan dan sangat tergantung pada budaya yang hidup di tengah masyarakat dan tingkat pendidikannya.

UUD 45 geubôh niseubah
Buhu Masalah atôran negara
Uram ujong di sinan keuneubah
sibagoë amanah meuneumat bangsa

Keu hukôm nanggroe beuna teugugah
beutatém peuhah asoe tabaca
Masyarakat peureulëe geucok surah
bèk sampé salah geupham makna

Keunan tarujuek meunyö ka salah
sigala masalah keunan beutaba
Hukôm tatimang pikéran taprah
di sinan tapeuglah taseutöt punca

Tapi lawét nyoe di popeurintah
hana that leumah cara geumita
Keu UUD 45 kureueng geuilah
cara geupeugah kureueng meumada

Wajéb geutanyoe tapeutrôh peuneugah
supaya beumeugah atôran negara
Bak tanggông-jaweueb até bèk goyah
bak mat amanah bèk rôh meutuka

Le that cara meunyö tadakwah
tamsé tapeugah tangieng budaya
Röt töh meunarék até teugugah
keunan tasinggah taci peutaba

Röt meureunoe pih jeuet tarambah
manyang ngön reundah meunurôt
kada
Meunyö manyang beulhök tasyarah
bèk that ilmiah keu ureueng biasa

Salah satu bentuk budaya yang hidup dan mudah diterima masyarakat Aceh dalam menyampaikan pesan apa saja ialah Hikayat. Biasanya mereka mendendangkannya di saat-saat relax dan bahkan ada sayembaranya. Untuk itu pemerintah daerah NAD mengambil peran mengubah UUD 1945 dalam bentuk hikayat agar pesan dan aturan yang ada dalam hukum dasar ini dapat dilantunkan dan dipahami oleh masyarakat melalui pesan media Hikayat dengan beberapa pertimbangan berikut.

Meunyö di Aceh Seuramoe Makkah
keu hikayat tagubah teuka seulira
Keu tutô meualeuet meuh'eut sileupah
peue lom takisah ngön mamèh suara

Kadang bak geuduek geupoh beurakah
ka teuka gairah keu seuni bahasa
Geucok hikayat geualôn bak lidah
meurasa puléh grah seuni geuhawa

Kadang geupeutandéng tutô meukisah
meutöh nyang ceudah bak bôh irama
Meutöh nyang göt juri peusiblah
geubri hadiah meunurôt kada

Maka di NAD lé popeurintah
geucok langkah turôt sireuta
UUD 45 seutuju jigubah
seutuju jikisah jibôh irama

Supaya ureueng geupham ngön mudah
meupeue amanah nibak negara
Meupeue peuneusan deungön
peutuwah
geucok hékeumah asoe calitra

Geutém seutuju hikayat jigubah
keu alat peugugah rakyat sineuna
Teuma geutimang meupeue peunayah
Di sinoe geusyarah na lhèe peukara

1. UUD 1945 dapat dikenalkan dengan kemasan yang sederhana dan mudah dicerna, praktis dan mudah dipahami oleh mereka
2. Masyarakat mayoritas akan lebih menerima jika materi sosialisasi hikayat UUD 1945 itu ditampilkan dengan pendekatan budaya yang hidup di tengah mereka
3. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan oleh aparatur pemerintah, tetapi juga dapat dilakukan oleh semua segmen masyarakat sehingga hukum dasar ini dapat mudah tersebar di tengah masyarakat tanpa sekat-sekat birokrasi.

Keuphôn jiteurimöng cara taulah
 Pakri tapeukeumah meuhu tamuba
 UUD 45 bahasa geupinah
 asai bèk sàlah makna geurika

Beumudah jigiléng uléh maidah
 bèk meukilah lidah watèe geubaca
 Beubagah muphôm watèe geumeudrah
 bèk sampé sôsah bak geucok makna

Teuma keudua lé masyarakatat luwah
 geutueng beumudah pakrikeuh cara
 UUD 45 meunyö tadakwah
 lam hikayat takisah galak jiteuka

Deungön hikayat rijang teugugah
 geudeungö pih bagah meualôn suara
 Keureuna sijalan deungön laseubah
 saweuep silangkah deungön budaya

Teuma keulhèe soekeuh peumeugah
 bandum pih sah warga negara
 Hana meuncéh lé popeurintah
 jeuet jipeugah lé rakyat biasa

UUD 45 taharap beumeugah
 keu masyarakat luwah halangan bèk na
 Hana bataih bak popeurintah
 mampu tapeugah pintô teubuka

Tujuan pengubahan ini untuk memperoleh perhatian, mendidik dan meyakinkan masyarakat terhadap betapa pentingnya kedudukan UUD 1945 dalam menjalankan roda pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Harapan kita semua semoga upaya sosialisasi UUD 1945 melalui pengubahan dalam bentuk hikayat mencapai sasarannya.

Selamat membaca.

Banda Aceh, 20 April 2009
Wakil Gubernur Aceh
(**Muhammad Nazar, S. Ag**)

Tujuan hikayat nyang ka geugubah peuratian teugugah peungarôh irama Beugeutémeureunoe yakin meutamah masyarakat mudah geuteupeue guna

UUD 45 geupham tan payah peunténg sileumpah teuka keunira Hukôm ngôn atô bak mat peurintah NKRI ka geusah singkatan nama

UUD 45 tapeutrôh peuneugah rôt hikayat tailah beugeutéme baca Beutrôh meukeusud beuna paédah beugeutéme teula'ah le aneuk bangsa

Selamat neubaca.

Banda Aceh, 20 April 2009
Wakil Gubernur Aceh
(**Muhammad Nazar, S. Ag**)



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

KATA SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

UUD 1945 merupakan wujud kesepakatan tertinggi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu sekaligus menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum Indonesia yang menjadi dasar dan harus di elaborasi dalam seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya, baik yang berisi perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia maupun yang memberikan pengesahan dan batas-batas terhadap kekuasaan negara. Untuk itu, keberhasilan pelaksanaan UUD 1945 tidak hanya merupakan tanggung jawab aparat dan lembaga negara, tetapi lebih penting lagi juga merupakan tanggung jawab segenap warga negara.

Pelaksanaan UUD 1945 yang menjadi tugas dan tanggung jawab segenap komponen bangsa bergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan upaya



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

RANUP SEGAPU KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

UUD 45 ka timang keu dali
Dasar hukum nyang tinggi di Indonesia
Man-mandum rakyat ka geu seupakati
Keu hak Institusi warga Neugara

Meunan cit bagoe keu hak asasi
Ngon batasan geu bri nyang mat Neugara
Man-mandum rakyat wajib peuduli
Beu ta pahami sadar pih beuna

Mula phon rakyat trok bak peujabat tinggi
Wajib partisipasi keu tata hukum
Indonesia

Meu macam bagoe jeut ta peu deuh hi
Asi ngon silaturrahmi seusama warga

Meunan umpana cara ta awasi
Asoe ngon materi bek jeut meutuka
UUD 45 beu sabe-sabe meukri
Nyan keuh konstitusi meubangsa-
meuneugara

Peureulee beu meuphom dum inti sari
Peu butoi keulai nyang goh
sampireuna
Lagee heut bangsa keu reformasi
Mandum beu leupie warga neugara

terus menerus untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap UUD 1945 sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan konstitusionalitas Indonesia. Partisipasi tersebut dapat dilakukan baik dalam bentuk dalam penyelenggaraan negara, maupun dengan mengembangkan hubungan antar warga negara. Dengan adanya pemahaman dan partisipasi segenap warga negara, UUD 1945 akan selalu terjaga dari penyimpangan dan penyalahgunaan, di sisi lain materinya akan senantiasa diperkaya dengan praktik-praktik kehidupan konstitusional UUD 1945 akan menjadi konstitusi yang hidup dalam praktik berbangsa dan bernegara.

Perlunya upaya peningkatan pemahaman terhadap UUD 1945 menjadi agenda yang semakin mendesak dengan adanya perubahan UUD 1945 sebagai bentuk keberhasilan bangsa Indonesia melakukan reformasi konstitusi. Perubahan tersebut cukup mendasar dan meliputi hampir seluruh ketentuan dalam UUD 1945. keberhasilan perubahan UUD 1945 sebagai bentuk reformasi konstitusi tersebut hanya akan bermakna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, jika dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa.

Meunyo ka meuphom lafai ngon arti
Mangat jeut meukri nanggroe ngon
bangsa
Man-mandum beujroh jaroe ngon gaki
Beudeuh bukeuti lagee lam fakta

Menyo ka meuphom dum aneuk nanggri
Mudah han sakri bak ta keurija
Keu bit that meu yum wahe e akhi
Get that seurasi bangsa ngon neugara

Mangat get meu phom naskah ngon isi
Peureulee ta rinci ujong ngon punca
UUD 45 beu mandum ta turi
Sajan meuriti lam hudep warga

Seubab lawet nyoe goh lom get meukri
Seumike ngon tiori mantong hana sa
Meunan cit lam buet beda that-that hi
Salah informasi keu rakyat jeulata

Adak na arahan hana get meu bri
Meumada ngon ci-ci ret media-media
Meunan cit istilah hana glah arti
Peu lom ata ta gali lam bahasa luwa

Uleh seubab nyan jinoo ta kaji
Meuwoe bak inti buet nyang nyata
Dum peungalaman keunan ta saji
Mangat seurasi buet ngon haba

UUD 45 norma-norma konstitusi
Beu glah bak gari rakyat lam donya
Masalah rakyat beu gleh ta eu hi
Meunan keuh materi UUD 45

Meunyoe masyarakat ka meu phom isi
Ka puleh seu-i rakyat ube na
Adat ngon budaya ta cok keu baki
Kulet beu meu hi asoe ngat rata

Untuk dapat meningkatkan pemahaman terhadap UUD 1945, maka diperlukan upaya memperluas akses masyarakat kepada naskah dan isi yang terkandung dalam UUD 1945, serta mendekatkannya kepada keseharian kehidupan masyarakat. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya tersebut adalah karena pembahasan masalah konstitusi dan materi muatan di dalamnya selalu menggunakan kerangka pikir, rujukan, teori, dan rujukan praktik bahkan istilah-istilah yang berasal dari luar negeri. Hal itu sering pula mengakibatkan cara penyampaian hanya terpaku pada media-media yang baku, yang belum tentu dapat menyentuh semua lapisan masyarakat.

Untuk itu diperlukan upaya domestifikasi UUD 1945, yaitu menjadikan UUD 1945 dan pengkajiannya dilakukan dengan merujuk pada pengalaman masyarakat dan problem nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Norma-norma konstitusional dalam UUD 1945 harus bersentuhan dengan masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat. Di sisi lain, norma-norma konstitusional tersebut juga dapat disampaikan melalui media cerita, sejarah, dan kearifan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Dengan

UUD 45 jinoe ka abeh ta turi
Cit sinan ciri Bangsa Indonesia
Ata nyan timoh pucok meuriti
Meujak that rapi meu-ikot masa

Meunan upaya geu buka kunci
Sadar konstiusi ngat meubudaya
Geu tuleh UUD 45 lam meubagoe versi
Ngat mudah ji kaji le rakyat dum na

Mangat jroh ta peulihara ngon ta
hormati Meunan keuh inti lam pasai
lhee ploh dua
Bahasa Daerah mandum beu lestari
Bek saban-sakri atoran jih na

Hingga na sabe taloe nurani
Nyang peutoe nadi ngon UUD 45
Lagee nyan hareutoe nyang ka geu rinci
Bah pih hana resmi kana useuha

Nyan ka geu dukong le Mahkamah Institusi
Ngon meubagoe lori geu keurijasama
Lam bahsa Jawa Ngoko, Sunda ngon Bali
Jawa Kromo Inggil, Arabi ngon Bahasa
Bima

Bandum atanyan get that meurasi
Rame nyang peuduli keu UUD Negara
Geujok penghargaan le Mahkamah
Konstitusi
Dukungan geubri meubura-bura

Dum nan ka seleuah le MK RI
Mangat lestari UUD 45
La'en nibak nyan ka lheuh sit geu ci
Ngon Arab-Jawi le that nyang hawa

Ka deuh ta kalon dukungan geu bri
Le Mahkamah Konstitusi geu balah jasa
Meubagoe naskah nyang beu'ot tradisi
Cit geu hargai luar biasa

melakukan elaborasi khazanah budaya dan intelektual serta pengalaman masyarakat setempat yang berhubungan dengan dasar-dasar konstitusional dalam UUD 1945, masyarakat akan merasakan bahwa sistem dan pemikiran yang menjadi materi muatan UUD 1945 bukan lagi sebagai hal yang asing, tetapi tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia.

Upaya tersebut sekaligus untuk mendekatkan UUD 1945 kepada masyarakat sebagai langkah awal menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi. Upaya mendekatkan itu salah satunya dilakukan dengan menerbitkan UUD 1945 dalam berbagai versi bahasa daerah dan tulisan sehingga ada kedekatan emosional dan mempermudah masyarakat, serta dengan sendirinya merupakan upaya memelihara dan menghormati eksistensi bahasa daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 Ayat (2) UUD 1945.

Sebagai upaya mendekatkan UUD 1945 kepada masyarakat demi terwujudnya *the living constitution*, sekaligus untuk melaksanakan Pasal 32 Ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa bahasa daerah harus dipelihara dan dihormati eksistensinya, Mahkamah Konstitusi RI telah mendukung dan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam menerbitkan terjemahan tidak resmi UUD 1945 dalam berbagai bahasa daerah, di antaranya bahasa Jawa Ngoko, Jawa Kromo

Ngon peutrok peusan ban kheun konstitusi
Hikayat pih meukri peureunoe bangsa
Meubagoe likok mangat ta tukri
Nilai-nilai tradisi ngon khsanah budaya
Seumangat pejuang ta karang keulai
Ret sarana komunikasi ta peu saboh
bangsa
Punca beureukat bak Hikayat Prang Sabi
Nyang han ek ji ungki le Peunjajah
Beulanda

Bak watee phon lawan Portugeh kana
bukeuti
Hikayat Prang Sabi thon Limongblah
dua-sa
Hikayat Malem Dagang nan phon geurasi
Asoe jih Prang Sabi jeut keu peunawa

Syekh Muhammad Ibn Abbas nyang
tuleh rawi
Keu bit sakeuti bak peukong jiwa
Dudoe meutamah Hikayat Prang Sabi
Nyang ka geu rawi le Syekh Ahmad Ibn
Musa

Bak tanggai limong buleun siploh
reseumi
Kitab Mukhtasar I-gharami geu kurek
punca
Bak Thon tujuhblah-siploh atra nyan
geu rawi
Lheuh nyan hai akhi na lom nyang puga

Kitab karya Syekh Al-Samad Al-Falimbani
Na cit Prang Sabi disinan nyata
Thon lapanblah lhee peut meutuleh bukeuti
Nyang bit-bit meukri thon lapanblah
lapan sa

Teungku Muhammad Pante kulu nyang
ka Haji

Inggil, Sunda, Bali, Bima. Selain itu juga telah diterbitkan UUD 1945 dalam Bahasa Arab, dan UUD 1945 dalam Bahasa Indonesia menggunakan aksara Arab Pegon (Arab-Melayu) yang mendapatkan sambutan hangat dari berbagai pihak.

Mahkamah Konstitusi sangat mendukung dan memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah menerbitkan UUD 1945 dalam bahasa-bahasa daerah lain, serta pembuatan naskah-naskah yang mengangkat kekayaan tradisional dan kearifan lokal sebagai media pendidikan mengenai UUD 1945 dan berbagai aspek.

Hikayat merupakan budaya *oral history* yang paling dikenal masyarakat Aceh. Hikayat telah berperan dalam menjaga nilai-nilai tradisi, khasanah budaya, serta membangkitkan semangat perjuangan masyarakat Aceh terhadap penjajahan yang tak terpatahkan sehingga Aceh dikenal sebagai daerah yang tetap bebas dari penjajahan Belanda. Salah satu sumber kekuatan tersebut adalah Hikayat Perang Sabil yang diwarisi turun-temurun.

Hikayat-hikayat perang sabil telah ada semenjak Aceh bertempur melawan Portugis pada 1521, salah satu yang terkenal dalam Hikayat Malem dagang karya Syaikh Muhammad Ibn Abbas. Pada perkembangannya muncul hikayat perang sabil lain yang ditulis pada 1710 gubahan dari kitab Mukhtasar I-Gharam karya Syaikh Ahmad Ibn Musa. Selain itu, terdapat

Geu tuleh Hikayat Prang Sabi peulet
Beulanda
Peu mardeka Nanggroe kaphee geu gari
Aceh that meukri cinta keu agama

Kaphee geu picrok geu catok ngon paci
Seubab ka ji jak ci tot Meuseujid Raya
Peubeudoh seumangat ngon Hikayat
Prang Sabi
Dudoe ngon Seudati geupeusaho irama

Ureung Aceh keu Hikayat keubit that
banggi
Ka leumah dali lam seujarah bangsa
Hikayat UUD 45 pih peureulee ta rawi
Ngat bek leukang hi di Aceh Raya

Hikayat UUD 45 nyoe get that lon
harga
Beu jeut keu kanji ngon buka puasa
Peu lom lheuh konflik na proses
Reintegrasi
Hikeumah Tsunami ngon peunawa
saba

Peumeurintah beujroh politek ngon
ekonomi
Sampoe bak inti sosial ngon budaya
Man-mandum beuget bek na le meu-
ungki
Dame beu abadi rakyat beu sijahtra

Hikayat nyoe beu trok u Dayah bak
Santri
Imuem ngon qadhi jeut-jeut Mushalla
Rata jeut rumoh ngon keude kupi
Beu meurit-riti lam gampong ngon
kuta

Geutanyoe lakee keudeh bak Rabbi
Teu buka kunci nyang hate baja

naskah hikayat perang sabil yang ditulis pada 1834 bersumber kitab karya Syaikh al-Samad al-Falimbani. Hikayat Perang Sabil yang saat ini paling dikenal adalah yang dikumpulkan dan diramu oleh Haji Muhammad Pantekulu (Cik Pante Kulu) pada 1881 yang memaparkan rasa cinta agama dan kemerdekaan masyarakat Aceh untuk melawan *Kaphee* Belanda yang telah membakar mesjid Raya Banda Aceh. Hikayat Perang Sabil kemudian dipadu dengan tarian Seudati untuk menggelorakan semangat juang masyarakat Aceh.

Mengingat pentingnya hikayat sebagai media budaya masyarakat Aceh, maka penyusunan dan penerbitan naskah Hikayat UUD 1945 sangat saya hargai. Apabila bagi masyarakat Aceh yang telah berhasil melalui konflik bersenjata yang berkepanjangan dan bencana tsunami yang memilukan Masyarakat Aceh saat ini sedang dalam proses reintegrasi, yang tidak saja harus berhasil dalam bidang politik dan pemerintahan, tetapi juga dalam lingkup sosial budaya.

Malalui penyampaian muatan-muatan konstitusional dalam hikayat-hikayat yang dituturkan di *dayah*, *meunasah*, dan rumah-rumah di seluruh pelosok Aceh, diharapkan masyarakat Aceh akan semakin menyadari hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia dan hak asasinya yang dijamin perlindungannya oleh UUD 1945.

Dengan demikian, menjadi warga negara

Beu bagah meuphom hak-hak
Konstitusi
Seubagoe dali warga Nanggroe
Indonesia

Nyang ka meujamin hak-hak asai
Ka jeulah ji lindungi le UUD 45
Ngat meumakna peunteng bak maseng
pribadi
Asoe aseuli lam Nanggroe Indonesia

Deungon lagee nyan kana jaminan
konstitusi
Ngon hak asasi lindongan pih kana
Lam peumeurintah pih kana hak
partisipasi
Sampoe hai akhi lam peu jroh Neugara

Prinsip nanggroe Hukom nyang
Demokrasi
Bek na meu ungki bek jeut keu dawa
Mandum masyarakat hana keucuali
Pak toke ngon kuli beu saban rasa

Ranup sigapu ohnoe hai akhi
Bek jeut keu campli beu jeut keu saka
Keu Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry
Salut ulon bri nyang that meujasa

Ateuh Hikayat nyoe nyang ka geu
prakarsai
Beu maju keulai khasanah bangsa
Keu UUD 45 keubit that peudoli
Beu jeut keu sari lam asoe kaya

Mudah-mudahan hase meuguni
Mandum peudoli ngon tem meubaca
Ngat bagah muphom naskah ngon arti
Mahkamah Konstitusi nyang peusan
haba

Indonesia memiliki makna yang penting bagi pribadi dan masyarakat. Menjadi warga negara Indonesia berarti mendapatkan jaminan perlindungan hak konstitusional dan hak asasi, serta hak dan kesempatan berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah berinisiatif menyusun UUD 1945 dalam Hikayat Aceh ini. Semoga dengan adanya hikayat ini UUD 1945 dapat semakin dipahami dan menjadi perekat bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat Aceh.

Jakarta, 1 Maret 2009

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD

Keu masyarakat di Aceh ta'zim lon bagi

Ngon silaturrahmi peukong syedara
Sajan meusaho tanyoe hai akhi
Lam saboh beulidi Nanggroe Indonesia

Teurimong gaseh bak Jimly
Asshiddiqie

Keu mandum akhi di Aceh mulia
Ranup sigapu Peutua Mahkamah
Konstitusi

Geunantoe bibi meusambot sapa

Jakarta, 1 Maret 2009

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD

DAFTAR ISI

Dari Penerbit.....	vii
Seulas Kata Penggubah Hikayat.....	ix
Pengantar Wakil Gubernur Aceh	xiii
Kata Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi RI.....	xix
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945....	1
Pembukaan	1
Bab I Bentuk dan Kedaulatan.....	5
Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat	5
Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara	7
Bab IV Dewan Pertimbangan Agung.....	18
Bab V Kementerian Negara.....	18
Bab VI Pemerintahan Daerah.....	19
Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat.....	22
Bab VIIA Dewan Perwakilan Daerah.....	25
Bab VIIB Pemilihan Umum	28
Bab VIII Hal Keuangan	29
Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan.....	31
Bab IX Kekuasaan Kehakiman.....	33
Bab IXA Wilayah Negara.....	38
Bab X Warga Negara dan Penduduk.....	38
Bab XA Hak Asasi Manusia	40
Bab XI Agama	47
Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara.....	48
Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan.....	49
Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial	51
Bab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.....	53
Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar.....	55
Aturan Peralihan	56
Aturan Tambahan	57
Lampiran	
Daftar Peserta Lokakarya	60
Tim Perumus Bidang Substansi	61
Tim Perumus Bidang Bahasa.....	62
Biodata Penggubah Hikayat	63
Panitia Penyusunan Hikayat Aceh tentang UUD 1945.....	65

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**UNDANG-UNDANG DASAR
NANGGROE
REPUBLIK INDONESIA
THON 1945**

Deungon bismillah kisah takarang
keu Undang-Undang Dasar Negara
Sibagoe meuneumat atoran geureuntang
keu nanggroe peunulang Indonesia

Nyankeuh peudoman beutapeutimang
bek sampe meusugang rugoe meuganda
Nanggroe beumakmu rakyat beuseunang
meunan geurancang le tokoh bangsa

Soekarno-Hatta ureueng kumandang
proklamasi geutayang Indonesia mardeka
Sampoe u Marouke mula di Sabang
geupakek keu lambang cicem Garuda

Mirah-puteh geupeuék bak tiang
Pancasila geupacang azas negara
UUD 45 atoran geupasang
geupeuteutap lam sidang le waki bangsa

Ngon musyawarah bandum geutimang
Ngon dada lapang bandum seulinya
Bandum teurimong hase lam sidang
Bandum ke reumbang lagee reencana

**PEMBUKAAN
(Preamble)**

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

**PEMBUKAAN
(Preamble)**

Kisah mulai ngon pembukaan
sibagoe ringkasan pokok calitra
Di sinoe mengandung pokok bahasan
bandum atoran di sinoe teuka

Beutaék saksi keu hai kemerdekaan
keubit atranyan hak sigala bangsa

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Haroih tasampoh meubagoe jajahan
tapeugadoh beukasan di ateueh donya

Hana seusuai ngon prike-manusiaan
pane sipadan ngon makhluk mulia
Peuneujeut Allah man-mandum saban
Seusama insan gaseh seutia

Meunancit lagèe ngon prikeadilan
sapat tan saban bak hak ngon jeumba
Nibak peunjajah hana atranyan
Tiep uroe Tuhan rakyat nyang theun jra

Bangsa peunjajah wajebeu ta lawan
Mangat na keuadilan ngon hak manusia
Lagee ka geu pubuet le para pahlawan
Meunan keuh hajatan le peundiri bangsa

Deungon usaha sireuta perjuangan
dalam geurakan Indonesia merdeka
Hingga troh masa nibak saboh jan
Sampoe bak tujuan ka troh ban hawa

Ka trok bahgia rakyat watee nyan
seulamat ngon aman seureuta seuntosa
Ka teubuka pinto gerbang tutopan
Sah keumardekaan Nanggroe Indonesia

Mandum meusaboh jiwa ngon badan
Ka sapue padan sabe sibangsa
Nanggroe meudaulat lagee atoran
Ka wajebeu saban ngon bangsa luwa

Ceng nyang ade bek le meu piasan
Dum rahmat Tuhan bagi beurata
Adak lam hukom bek meunan-meunan
Mandum beujalan lagee kheun fakta

Makmu beurata beusaban-saban
Kuli ngon tuan ban laku jumba
Bek ban rayek su bulung sikuyan
Nyang mat pimpinan meugunca-gunca

Nyang geu kheun ade kon lagee nyan
Beuna sipadan buet ngon haba

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam

Meunan cit makmu mandum tingkatan
Saboh haluan tujuan warga

Beureukat rahmat Allah ateueh nan
Tuhan
Neubri kekuatan le Nyang Maha Kuasa
Deungon niet ikhlah timoh dorongan
geupeuglah meukuran bak meuc'uet bangsa

Bek le jililet le penyaket jajahan
geuumum le teuman Indonesia mardeka
Han jeuet le meusidroeu peuceukoe urosan
udep sijalan ngon fitrah manusia

Rakyat Indonesia geupeutroh seruan
geuumum kemerdekaan ban sigom donya
Prang hana le beude geusimpan
nanggroe ka aman hana le subra

Geubri maklumat dum seukalian
keu bandum jiran nanggroeu teutangga
Mangat jiwaui wilayah ka sah batasan
PBB geusahkan lam buku donya

Ban saboh donya jideungo siaran
Proklamasi kemardekaan Indonesia
Wajib tasyuko ateueh rahmat Tuhan
Nyang ka geuseulamatkan nanggroeu pusaka

Teuma 'oh dudoe dari pada nyan
geubeuntuk pemerintahan Nanggroe
Indonesia

Beu jeut meulindung cuco pahlawan
Nyang ka geu korban darah ngon jiwa

Beu maju ngon sijahtra mandum lapesan
Bek le meukuran dum aneuk bangsa
Beu carong bangsa hudep beu simban
Bangai pikeran sagai bek le na

suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bangsa beu udep na ngon bimbingan
Ngat teupat jalan bek roh lam paya
Mangat deuh beda ngon masa jajahan
Peudong peundidikan sampoe lam rimba

Ngon bangsa laen ka sapue tujuan
Meuikot saban teureuteb lam donya
Beudame abadi bèk na le gangguan
Bah keadilan beusare ngon rata

Meunan meususun bah Keumerdekaan
dalam Undang-Undang Dasar Negara
Bandum geubentuk lam saboh ayan
Geu lheung atoran ateuh dasar nyang
sama

Nanggroe mardeka ateueh kedaulatan
rakyat di sinan nyang mat kuasa
Merdeka geupeudong di ateuh landasan
kepada Ketuhanan Nyang Maha Esa

Mardeka geubina ateuh Kemanusiaan
Adab ngon keadilan beumeubudaya
Mardeka geuikat deungon Persatuan
lam nanggroe keusatuan Republik
Indonesia

Teuma geuseubot ngon Kerakyatan
geuboh batasan bèk salah makna
Rakyat dipimpin le hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan utosan bangsa

Dum pilehan rakyat nan perwakilan
Yang peuget atoran urosan negara
Teuma keadilan sosial akhe tujuan
keu bandum insan rakyat Indonesia

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)
- 3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Lam amandemen beuntuk ngon daulat hana le geusurat tulesan negara Maka tulesan di sinoe ka singkat ka meuhu alamat jikandong makna

Pasal 1

Dalam ayat phon hase lam rapat Indonesia geuseumat nama negara Nanggroe Keusatuan sapeue pendapat Republik sipakat beuntuk negara Lam ayat keudua meulaen geusurat ka gegantoe kalimat deungon berada bek salah alamat makna meudaulat lam jaroe rakyat nyang mat kuasa Bak UUD beuna geumumat bukon tan syarat bak mat kuasa Hanjeuet tagalak lagee ban mangat hanjeuet tahujat lagee ban suka Lam ayat keulhee teuma geupeukong bukon cit mantong deungon kuasa Tapi ngon hukom bandum geusokong bek sampe hana kong tapeudong negara

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

Lam bab keudua Majeulih Duek Pakat Majeulih Rakyat kadang lon sapa Meubagoe istilah MPR geusingkat meuhu isyarat watee neubaca Payah tacae deungon taradat maka lon singkat meunurot irama

Lam pasai keudua Majeulih Rakyat
dalam lhee' ayat ka meupeue rupa

Lam ayat keuphon dilee geucatat
Majeulih Duek Pakat meusoe anggota
Teuntee ureueng pilehan rakyat
ureueng teuhoreumat pilehan bangsa
Anggota nyang phon Majeulih Mupakat
waki rakyat dilee geumita
Nyankeuh Dewan Perwakilan Rakyat
DPR geusingkat geurasi nama

Dewan Waki kadang lon surat
Waki pusat kadang lon rika
Meubagoe istilah lon singkat kalimat
meuho alamat bek salah duga
Silaen nibak nyan kalimat geubah
Waki Daerah di sinoe geupeuna
Nyankeuh Dewan Perwakilan Daerah
DPRD ka meugah singkatan nama

Pakri cara waki geurinteh
awaknyan geupileh lewat pemilu
lam kawan umun geu-eu beumeuncheh
teuntee nyang areh ureueng situju

Ngon undang-undang cara geuureh
beubek meulanggeh ngon hukom negara
di sinan geuato geu-eu ngon habeh
bek teuka seuliseh ngon sabe bangsa

Lam ayat keudua teuma geucatat
sidang duek pakat meudum kutika
Limong sigo watee geusingkat
keudeh meusapat u pusat negara

Lam ayat keulhee keuputusan rapat
keuteutapan geuangkat nyang le suara
ka meunan ukoran deungon seunipat
ka meunan adat udep lam donya

Pasal 3

Pasai nyang keulhee jinoe taradat
keu Majeulih Rakyat meupeue keurija
ukeue neubaca lam lhee boh ayat
lagee geusurat meunan lon rika
Dalam ayat phon di Majeulih Rakyat

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang
sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu
kota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan
Rakyat ditetapkan dengan suara yang
terbanyak.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah
dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
***)

*) : Perubahan Pertama
) : Perubahan Kedua
) : Perubahan Ketiga
) : Perubahan Keempat

- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/ ****)
- 3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/ ****)

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)

*) : Perubahan Pertama
 **) : Perubahan Kedua
 ***) : Perubahan Ketiga
 ****) : Perubahan Keempat

ureueng duek pakat sidang negara
 UUD geubah lage ban hajat
 geupeuteutap lam rapat menurot masa

Lam ayat keudua di Majeulih Rakyat
 ureueng cok bai'at keupala negara
 Geuikot le Waki teuma le leugat
 mangat bek meuilat amanah bangsa

Lam ayat keulhee di Majeulih tinggi
 jeuet geupeubeureunti pucok pimpinan
 Jeuet geupeupiyoh Presiden ngon Waki
 ngon cara sendiri leungkap alasan

Jeuet geupeupiyoh lam masa jabatan
 walee pimpinan masa goh habeh
 Tapi geujak buet meunurot atoran
 ngon undang-undang bandum geureh

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

Bab nyang keulhee teuntang kekuasaan
 suai pemerintahan dalam negara
 Pasai nyang keupeuet lagee urotan
 na dua rincian ayat geurika
 Ayat keuphon teuntang popeurintah
 Presiden geupeusah nyang mat kuasa
 Ngon undang-undang kuasa geulimpah
 bek sampe meuilah bak mat neuraca
 Ayat keudua teuntang peulaksanaan
 tugaih keuwajaban keupala negara
 Beuna nyang bantu pucok pimpinan
 Wakigeuh san ikot sireuta

Jinoe tarawi pasai keulimong
 ayat tahitong dijih na dua
 Dalam ayat phon laju tatamong
 na hak geutanggong le keupala negara

Pasal 5

Uleh Presiden na hak geutimang
 na hak meurancang tugaih nyang geubri

- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.***)

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)

Hak geujok rancangan undang-undang keudeh geutatang bak Dewan Waki

Keu ayat keudua jinoe takisah
peuraturan popeurintah beuna taturi
Presiden peuteutap atoran peukeumah
undang-undang ka geusah beubek
beureunti

Pasal 6

Pasai nyang keunam tapham beuareh
ayat teutuleh dijih na dua
Presiden ngon Waki sinoe geugareh
ureueng beumeunceh sinoe geurika

Dalam ayat phon Presiden geurawe
Wakigeuh sare bek ureung teuka
Warga Indonesia seumeunjak lahe
hantom geumeucure ngon sabe bangsa

Keupada negara hantom khianat
mampu ngon sehat jiwa ngon raga
Tugaih kewajeban geupeutroh amanat
sibagoe peujabat pimpinan negara

Lam ayat keudua geuboh ngon syarat
undang-undang peuteupat cara geupeuna
Undang-undang nyang ato cara taangkat
bek salah alamat pemimpin bangsa

Pasal 6A

Lam amandemen atoran geutamah
asoe geusurah lam pasai nam A
Na lhee boh ayat sinoe geupeugah
neusimak le bagah meupeue calitra

Dalam ayat phon calon geurinteh
sipasang beumeunceh pimpinan negara
Presiden ngon Waki langsung geupileh
bek sampe meulanggeh cara geupeuna

Lam ayat keudua calon pasangan
calon usulan nibak peureute
Le saboh peureute atawa gabungan
geusui dengan nan nama peserta

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)

- 4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ****)

Nama geukirem bek hana meujan sigolom pemilihan nama beuka na Sigolom pemilu geujok usulan leungkap di sinan calon bandua

Peureute di sineo bek sampe meulanggeh politek beumeuceh geuseubot nama Nyang ikot sireuta dalam meumileh calon geurinteh haroih na dua

Lam ayat keulhee pasangan geurawi Presiden ngon Waki geupileh beusahaeh Limong ploh persen suara beujibri tapi tan kawi meunyo hana leubeh

Limong ploh persen haroih meutamah nibak jumlah suara peumileh Meunan geukira sicara meuluwah bandum wilayah geukira beuabeh

Meunyo geukira tiep-tiep provinsi suara beujibri dua ploh persen Kureueng nibak nyan ka tan geuasi Presiden ngon Waki hana geureken

Meunyo ka teupileh calon pasangan geulantik le teuman keupala negara Nyan baro sah menjadi pimpinan geumat jabatan le gopnyan bandua

Dalam ayat peuet meunyo tan teupileh maka geureh ngon laen cara Geukalon laen cara geurinteh pasangan geugareh bak sa ngon dua

Cara geukalon calon geudukong meutoh geuteurimong cara cit ka na Uleh rakyat geupileh langsung teuma geuhitong nyang le suara

Teuma gopnyankeuh geulantik Presiden gopnyan geureken ureueng lumboi sa Dilikot nibaknyan hitongan geupen keu Waki Presiden lumboi keudua

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali jabatan. *)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan

Ayat keulimong teuntang pelaksanaan dalam pemilihan kepala negara Ngon undang-undang geuato lanjutan geutuung di sinan atoran keurija

Pasal 7

Pasai keu tujuh geuboh batasan masa jabatan pimpinan negara Presiden ngon Waki limong thon gileran geupeugot pemilehan 'oh troh kutika

Meunyo gileran teuma ka habeh sigo treuk geusafeh pinto teubuka Leubeh nibaknyan hanjeuet geurinteh hanjeuet geupileh leubeh bak dua

Pasal 7A

Pasai tujuh A jinoo takheun kri Presiden ngon Waki lam masa jabatan Meunyo masa nyoe gopnyan tan meukri le Majeulih Tinggi jeuet cok tindakan

Keu Majeulih Rakyat na hak geubri jeuet geupeubeureunti pucok pimpinan Tapi na syarat gopnya lalu le Dewan Waki beugeujok usulan

Jeuet geupeupiyoh Presiden ngon Waki meunyo teubukti lam peulanggaran Atawa khianat deungon korupsi laen lom lagi deungon sogokan

Atawa pidana hukoman nyang brat hana geuluwat keu buet teuceula Atawa tan le lagee geusyarat kurusi ngon pangkat jaded geuhila

Pasal 7B

Lam amandemen na pasai tujuh Be di sinoe geucae keupala negara Sireuta ngon Waki di sinoe geurawe suai geusinde geucok kuasa

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Pengajuan Permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang

Dalam ayat phon Presiden ngon Waki geususui beureunti le Dewan Rakyat Usulan geupeuek keu Majeulih Tinggi sireuta bukeuti cukup ngon syarat

Sigolom nyan beugeutem adili le Mahkamah Konstitusi beugeutem pareksa Meuepeue geugogot le Dewan Waki Presiden ngon Waki geukheun meulangga Meupeue neudakwa meutoh bukeuti geutunyok ngon dali bandum peukara Peukeuh khianat atawa korupsi meubagoé bukeuti tindak pidana

Meunyo ka cukup alasan ngon dali Presiden ngon Waki geuhukom pidana Geucok putusan le Mahkamah Konstitusi Presiden ngon Waki geuhukom pidana

Maka geubeudoh Dewan Waki bak Majeulih Tinggi putusan geuba Bak watee nyoekeuh le Majelih Tinggi Presiden ngon Waki geucok kuasa

Lam ayat keudua di Dewan Rakyat Presiden geugugat sireuta ngon Waki Geutudoh meulangga atawa khianat tan cukup syarat beujeuet beureunti

Pakon jeuet meunan pendapat Dewan dalam pengawasan gopnyan na fungsi Meunyo ka salah pucok pimpinan geupeuek usulan bak Majeulih Tinggi

Jinoe takisah asoe ayat lhee Dewan meulakee ubak Mahkamah Mahkamah Konsitusi geusudi dilee anggota geutunggee padum jumeulah

Anggota Dewan jumlah peureulee dua bagi lhee jumlah anggota Siluruh anggota dumnan peureulee dumnan geubri thee rapat geuteuka

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)

Meunan cit lom teuma geulakee
dua bagi lhee nyang troh lam rapat
Dumnun jumlah atoran peuteuntee
baro geuangkee pimpinan geugugat

Ayat keupeuet Mahkamah Konsitusi
wajib geuungki bandum peukara
Wajib geuadili pendapat Waki
putosan geubri salah ngon beuna

Watee geubri sikureueng ploh uroe
seumeunjak geupeujaroe le Dewan Waki
Dumnankeuh trep peukara geutampoe
bek sampe meupaloe putusan geubri

Ayat keulimong teuma geupeugah
pimpinan geupeusah hukoman pidana
Ka na putusan sidang ka keumah
ka beutoi meusalah atoran geulangga

Ka beutoi meulangga han pat taralat
ka beutoi khianat han pat tabela
Beutoi korupsi lagee jigugat
beutoi jihujat gopnyan teuceula

Atawa gopnyan ka gadoh syarat
hana le meuneumat ka gadoh kuasa
Maka geubeudoh Dewan Rakyat
sidang mupakat laju geupeuna

Sidang paripurna rapat geuseubot
usulan geupeuturot keu Majeulih Tinggi
Peukeuh Presiden jadeh geupeurhot
atawa geuceugot pangkat bak Waki

Lam ayat keunam Majeulih Rakyat
sidang mupakat wajib geupuga
Usulan Dewan geuba lam rapat
paleng lambat padum kutika

Lhee ploh uroe watee geuhitong
seumeunjak geuteurimong bak Dewan
Waki

Dumnankeuh trep watee geutanggung
lheuehnyan langsung putusan geubri

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)

*) : Perubahan Pertama
 **) : Perubahan Kedua
 ***) : Perubahan Ketiga
 ****) : Perubahan Keempat

Jinoe lon rawi ayat keutujuh
 usulan geupeutroh le Dewan Rakyat
 Presiden ngon Waki geulakee beupiyoh
 Majeulih peuputoh tapi na syarat

Maka Majeulih geucok le langkah
 geuhei musyawarah bandum anggota
 Lhee bagi peuet beuna jumeulah
 beutroh geulangkah rapat geuteuka

Putosan geucok anggota peureulee
 dua bagi lhee nibak nyang teuka
 Tapi yoh goh geukhok palee
 peunjelasan dilee haroih geumita

Presiden ngon Waki geubri peuluang
 di keue sidang nyang paripurna
 Geubri peundapat saleng meusilang
 putusan ka reumbang ragu pih hana

Pasal 7C

Pasai tujuh Ce Presiden ka buntu
 meunyo tan situju keu Dewan Waki
 Hana peububar ngon peukaru
 walee sigitu hana pat ungki

Pasal 8

Jinoe takisah pasai keu lapan
 'oh wafeuet pimpinan lam ayat keu sa
 Atawa geupiyoh jicok jabatan
 jipeureunti gopnyan goh habeh masa
 Atawa gopnyan tugaih tan jalan
 sigala keuwajiban hana geukira
 Meusoe geulantoe meuka lagee nyan
 Wakigeuh sajan peuabeh sisa
 Lam ayat keudua Waki ka tan
 Majeulih Permusyawaratan beudoh le sigra
 Meupeue geupubuet teuma di gopnyan
 meupeue urosan gopnyan usaha
 Majeulih geuato bek sampe laloe
 geundang sinaroe bandum anggota
 Watee geubri cit nam ploh uroe
 calon beumeusoe bek trep meutunda

- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanansecarabersama-sama.Selambatlambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. *****)

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Calon Waki beuna dua droe
Presiden keudroe nyang usui nama
Tugaih Majeulih sidang geupakoe
pemilihan jinoo laju geurika

Lam ayat keulhee Presiden ka tan
ka woe bak Tuhan sigo ngon Waki
Atawa geupiyoh ngon jicok jabatan
atawa keuwajeban ka tan padoli

Sigo bandua pakrikeuh jinoo
meusoe geulantoe meusidroo hana
Tugaih Presiden geupeucaya jinoo
bak lhee meuntroe pimpin negara

Nyang phon Menteri Luwa nanggroe
nyang Dalam jinoo teuma keudua
Teuma nyang keulhee beuna tatusoe
nyang peutheun nanggroe deung
seunjata

Tapi hana trep meunan bagoe
lhee ploh uroe geubri masa
Maka Majeulih hana geuiem droe
sidang jinoo laju geupeuna

Sidang Majeulih teuntang pimpinan
dua pasangan usulan peureute
Le saboh peureute atawa gabungan
ngon politek awaknyan hantom jimeucro

Presiden ngon Waki nyang teupileh dilee
atoran ka teuntee nyang le suara
Suara keuphon geupileh keu ulee
Waki meulakee lumboi keudua

Presiden ngon Waki peuabeh watee
Meuntroe ban lhee pulang kuasa
Jabatan gopnyan beuna tathee
Cuma geuangkee peuhabe masa

Pasal 9

Pasai sikureueng sumpah jabatan
yoh goh pimpinan tamong keurija
Presiden-Waki sumpah bak Tuhan
geuucap ngon lisan ban kheun agama

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
*****) : Perubahan Keempat

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Janji Presiden (Wakil Presiden):

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."*)

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. *)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Atawa geumeujanji yakin hana ban
ngon Majeulih di sinan saksi silingka
Atawa cit di keue hadapan Dewan
geuucap ngon lisan geukheun beunyata

Demi Allah ulon meusumpah dalam jabatan
lon peunuhi keuwajaban keupala negara
Lon peubuet nyang got ade hana ban
lon mat atoran hana meutuka
Bak Undang-Undang Dasar lon cok pegangan
ulon jalankan peurintah negara
Peuekeuh undang-undang atawa atoran
ulon laksanakan deungon sibeuna
Ulon bakeuti dalam jabatan
sibagoe pimpinan abdi negara
Sigala atoran ulon jalankan
demi kebajikan nusa ngon bangsa

Meunyo geumeujanji pucok pimpinan
bak ucap nan Tuhan sinan meubeda
Ulon meujanji yakin hana ban
lon peunuhi keuwajaban keupala negara
Lon peubuet nyang got ade hana ban
lon mat atoran hana meutuka
Bak Undang-Undang Dasar lon cok pegangan
ulon jalankan peurintah negara
Peuekeuh undang-undang atawa atoran
ulon laksanakan deungon sibeuna
Ulon bakeuti dalam jabatan
demi kebajikan nusa ngon bangsa

Lam ayat dua Majeulih ngon Dewan
sidang geupeutan rapat ka hana
Presiden ngon Waki meusumpah bak Tuhan
meunurot anutan meutoh agama
Atawa geumeujanji bak Majeulih Tinggi
bak pimpinan seundiri tan roh anggota
Le Mahkamah Agung Keutua peusaksi
sempurna janji gopnyan bandu

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****)
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

Pasal 10

Pasai keusiploh Presiden peutimang angkatan geupawang gopnyan kuasa Angkatan Darat ngon Laot meureuntang sampoe u mayang angkatan Udara

Pasal 11

Lam pasai keusiblah meupeue atoran Lam ayat sa tatuban meunyo prang jiteuka Uleh Presiden geuseutujui le Dewan geupeugot pengumuman nanggroe tabila

Miseue geuumum nanggroe dalam prang karu ngon teugang miseue ka reuda Miseue ka dame tan le menentang janji geupasang ngon nanggroe luwa

Lam ayat keudua Presiden meujanji ngon sabe meuturi ngon nanggroe luwa Teuka akibat keu rakyat seundiri atoran meungki ngon sabe bangsa

Teukaet ngon peng kadang akibat kadang meuhunyat atoran negara kadang meubah atoran sipakat haroih geumupakat ngon Waki bangsa

Ayat keulhee jinoo taseubot janji leubeh lanjot gon awak luwa Ngon undang-undang bandum geuturot bek sampe karot ngon sabe bangsa

Pasal 12

Pasai du blah Presiden nyatakan nanggroe tan aman dalam bahaya Meupeue syarat akibat tatantang ngon undang-undang geuboh keunira

Pasal 13

Pasai lheeblah jinoo tasurat na lhee ayat di sinoe geurika Dalam ayat phon Presiden geuangkat u nanggroe shahabat geukirem duta Geuangkat konsul di likot nibak nyan geupeugot hubungan ngon nanggroe luwa

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. *)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan

*) : Perubahan Pertama
 **) : Perubahan Kedua
 ***) : Perubahan Ketiga
 ****) : Perubahan Keempat

Awaknyan geuangkat meubagoe urosan mangat udep sipadan ngon laen bangsa

Lam ayat keudua duta geuangkat hanjeuet ban mangat keupala negara Beuna geupeureumeun deungon geuingat bak Dewan Rakyat pakrikuh haba

Lam ayat lhee Presiden teurimong duta jitamong baro ban teuka Bak Dewan dilee geujak teumanyong puekeuh meukeunong atawa hana

Pasal 14

Pasai peuetblah jinoo tarawi ayat geurinci dua meususun Lam ayat keusa Presiden geubri geukheun grasi salah beuampon

Teuma geuseubot rehabilitasi keuhormatan geukembali lagee simula Bak Mahkamah Agong geutanyong pakri hanjeuet beurangkakri keupala negara

Lam ayat keudua geujok amnesti lam politik geuasi ureueng pidana Meunancit lom ngon abolisi bek le geuungki sigala peukara

Meunyo atra nyoe bandum geubri ngon Dewan Waki geumeuduek dilee Bek sampe salah ngon tan geuturi hanjeuet saban sakri amanah bangsa

Pasal 15

Pasai limongblah presiden peutimang geularan teupandang ngon tanda jasa Ngon tanda horeumat meubagoe kadang ngon undang-undang geuboh keunira

Pasal 16

Lam pasai namblah geutamah atoran geupeuna dewan le Keupala negara Dewan Pertimbangan geuboh deungon nan teupat bri pandangan watee geumita

pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****)

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Dihapus.****)

BAB V
KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Meunyo Presiden geuboh pikeran 'oh geutron lapangan saran beukana Ngon undang-undang geuboh atoran hanjeuet beurangkaban atoran negara

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
(dihapus)

Bab keupeuet jinoe tahitong Dewan Pertimbangan Agong geukheun DPA Di sinoe hana le bek le neutanyong kisah ka puntong bek le tarika Bab DPA ka habeh geusampoh asoe na geutroh lam bab keunamblah Di sinan meusisa neukalon beuroh meunyo keu peunutoh neu-eu sjarah

Lam pasai namblah kalheueh geubayang Dewan Peunimbang Keupala negara Maka geusampoh bek le meulang bek meutang-ilang bak ulon kira

BAB V
KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17

Bab keulimong jinoe tameuproee keu para meuntroe dalam negara Pasai tujuhblah tapeugah jinoe lhee ayat di sinoe laju tabaca

Lam Ayat keuphon teuma di meuntroe geubantu hiroe keupala negara Deungon Presiden gopnyan beugot toe meunurot geusiboe bidang keurija

Lam ayat keudua nyang angkat meuntroe Presiden keudroe ureueng geumita Meunyo meuntroe tugaih ka laloe geupeupiyoh le jinoe laen geutuka

Jinoe takisah ayat nyang keulhee bidang meuteuntee meuntri beumeusoe Tiep-tiep meuntroe bidang geuangkee meumacam lagee urosan nanggroe

- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)

Lam ayat keupeuet geupeuna menutroe geubah bagoe pakrikeh cara Meunancit geububar tan le geupakoe undang-undang nyang hiroe bandum peukara

BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

Bab keunam keu popeurintah nyang mat daerah jinoe tarawi Asoe geupeugah bak pasai lapanblah ayat geukisah tujuh meuantri

Keu ayat nyang phon cae longubah asoe geusyarah deungo lon rawi Nanggroe geubagi ateueh daerah nyang phon geupeusah geukheun provinsi

Provinsi geubagi bek sampe luwah nyankeuh wilayah kabupaten ngon kota Tiep-tiep wilayah na soe peurintah ngon undang-undang geulah bandum peukara

Lam ayat keudua Popeurintah provinsi geuroih seundiri sampoe ngon kota Daerah geupeudong ateueh asas otonomi bantuan geubri uleh negara

Lam ayat keulhee di daerah seundiri na Dewan Waki leungkap anggota Dewan Waki Daerah namageurasi ngon pemilu geucari geucalon nama

Lam ayat keupeuet keupala provinsi gubernur geurasi meusyuehu nama Teuma di kabupaten geukheun bupati geuboh nan wali keupala kota

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Awaknyan geupileh lewat pemilu
pasangan sikufu keupala ngon waki
Sicara demokratis atoran peulaku
rakyat bek ragu hate beukawi

Lam ayat keulimong asoe tahemat
otonomi luwah that meunyo tarawi
Keucuali ngon undang-undang atoran
meukat
geuato le pusat bek saban sakri

Ayat keunam daerah geubri hak
watee geupeujak atoran seundiri
Supaya otonomi bek sampe seungkak
tugaih geupeujak bek sampe teureunti

Lam ayat keutujuh atoran gupeujak
undang-undang talacak bek salah cara
Bek sampe menentang deungon meuparak
lam ayat tasimak bandum ka nyata

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)

Pasal 18A

Pasai lapanblah A jinoe tasurat
ayat sa ka meuh at dilee tarawi
Pakri wewenang popeurintah pusat
hubungan meukat deungon provinsi

Ngon kabupaten pakri ikatan
ngon kota pih meunan teumpat duek wali
Ngon undang-undang geuboh atoran
bek na tantangan kuasa geubagi

Bandum geuato ngon undang-undang
supaya reumbang atoran negara
Meubeda daerah meukri geutimang
bek sampe goyang bak mat kuasa

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. **)

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **)

- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

Lam ayat keudua geuato hubungan sampoe keuuangan suai beulanja Keu rakyat umum pakri layanan suai penggunaan sumber hareuta

Pusat ngon daerah geuato beuade hudep meusampe bandum beurata Ngon undang-undang geuato beusare bek sampe cre-bre ngon sabe syedara

Pasal 18B

Pasai lapanblah Be jinoo tasurat ayat le leugat jinoo tarawi Uleh negara beugeutem akui popeurintah geurici meunurot hemat

Ubit ngon rayek rendah ngon tinggi beugeutem hormati lagee ban hajat Maju ngon mundo beugeutem padoli lagee dikeuheundaki meunurot rakyat

Daerah khusuih beugeutem padoli istimea geubri meunurot tingkat Ngon undang-undang atoran geubri hanjeuet beurangkri beuna meuneumat

Lam ayat keudua negara akui beugeutem padoli wilayah adat Beuna geuingat keu hak tradisi asai seurasi ngon udep rakyat

Hana meunentang ngon atoran RI hana meungki deungon siasat Ngon undang-undang bandun geungki baro jeuet geubri lagee ban hajat

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **)
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. **)
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *)
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19

Bab keutujuh jinoe tarawi
keu Dewan Waki pilehan rakyat
Lam pasai sikureueng blah asoe geurinci
tacuba teuliti di dalam ayat

Lam ayat keuphon di Dewan Waki
ngon pemilu geucari lam kawan rakyat
Le rakyat umum suara geubri
di sinankeuh meuri meusoe alamat

Lam ayat keudua Dewan geurancang
ngon undang-undang susonan geutata
Di sinoe Waki teupnat meubincang
teupnat peutimang rakyat ube na

Lam ayat keulhee jinoe talisi
keu Dewan Waki pajan duek pakat
Pajan duek sidang watee beumeri
sithon sikali sideh di pusat

Pasal 20

Pasai duaploh jinoe tapeutrang
ayat geukarang na limong angka
Ayat keuphon Dewan peutimang
geubeuntuk undang-undang gopnyan kuasa

Ayat keudua seuleusoe geurancang
maka undang-undang meuhokeuh geuba
Geuba bak Dewan geubahaih lam sidang
turot peubincang keupala negara

Pasai ngon ayat ka habeh geugoegoe
geuseutujui le jinoe uleh nyang teuka
Bandum anggota geutanda jaroe
Presiden keudroe turot sireuta

- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. **)
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. **)
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **)

*) : Perubahan Pertama
 **) : Perubahan Kedua
 ***) : Perubahan Ketiga
 ****) : Perubahan Keempat

Ayat keulhee meunyo tan situju rancangan ka buntu putosan hana Maka lam sidang geutop le buku hanjeuet le geujaju lam saboh masa

Ayat keupeuet rncangan situju hana le buntu meusipatah kata undang-undang ka hase hana le ragu geusahkan laju le keupala negara

Ayat keulimong rancangan situju tapi na sigitu bak keupala negara Han geutem sahkan kadang na tunu pakrikeuh laku peukeuh na cara

Maka geupreh watee geuteken tapi Presiden geupen hana Lhee ploh uroe ka sah geuren walee tan geupen le keupala negara

Lheephloh uroe pajan mulai seumeunjak geuseutujui uleh Dewan Seumeunjak rancangan wajebeukawi undang-undang ka jadi nibak watee nyan

Pasal 20A

Pasai duaploh A keu fungsi Dewan lam ayat sa geuboh nan ngon legeslasi Fungsi keudua geukheun anggaran fungsi pengawasan akhe seukali

Ayat keudua dalam geulaksana fungsi nyang ka lueh geubri keu Dewan Rakyat Ka jeuet keu hak gopnyan miliki nyang ka geurawi lam meubagoe ayat

Geubri lom hak interpelasi hak seumeudi nyang peureulee geuralat Teuma hak angket keu geujak teuliti geutamah geubri ngon hak pendapat

- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. **)
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. *)

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Lam ayat keulhee na hak teumanyong na hak peutamong usui-peundapat Na hak imunitas keubai oh keunong geuseurah langsung keu Dewan Rakyat

Ayat keupeuet keulanjutan geuteuoh hak beumeutoh keu Dewan Rakyat Sireuta anggota sama peuleuoh undang-undang satoh meupeue geuhajat

Pasal 21

Pasai duaploh-sa jinoe tabeuntang ayat sa tapeutrang keu anggota Waki Hak geuaju usui meupeue rancangan khusus undang-undang keu Dewan sendiri

Dalam ayat sa hana jeuh beda cuma bahasa bacut seuliseh Hana meulang geutuleh anggota memaju geutuka meng-aju geutuleh

Ayat keudua ka geutem seutujui geuteurimong resmi lam sidang Dewan Tapi Presiden ka tan padoli han geutem peukawi deungon geusahkan

Maka rancangan nyang hana geusahkan hana tekanan keupala negara Hanjeuet geuaju le keupada Dewan untuk persidangan lam saboh masa

Pasal 22

Pasai duaploh-dua na lhee ayat kepentingan darurat watee teupaksa Dalam ayat phon sinoe geusurat lam masa darurat pakrikuh cara Peraturan Pemerintah Presiden surat gantoe meuneumat dalam keurija Sibagoe geunantoe undang-undang teusurat dalam meukarat mudah pih teuka

*) : Perubahan Pertama
 **) : Perubahan Kedua
 ***) : Perubahan Ketiga
 ****) : Perubahan Keempat

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. **)

BAB VIIA*) DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ***)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Lam ayat keudua geupeugah meuturot beugeutem sambot le Dewan Waki Beugeutem sipakat lam sidang beurikot atoran teuseubot beugeutem akui

Lam ayat keulhee asoe tausot geukira tan patot le Dewan Waki Han geutem situju atoran teuseubot laju geucabot tan le geuasi

Pasal 22A

Pasai duaploh-dua A keu beuntuk geukaji undang-undang seundiri pakri geupeuna Ngon undang-undang bandum geuungki supaya kawi atoran negara

Pasal 22B

Pasai duaploh-dua Be meusoe peupiyoh anggota geupeujatoh nibak jabatan Tapi ngon syarat cara beutatroh undang-undang geuteumpoh meunan atoran

BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Lam bab tujuh A buhu geutamah bak tiep wilayah beuna cit Waki Di sinoe geuato nama geupeusah Dewan Perwakilan Daerah nama geurasi

Pasal 22C

Pasai duaploh dua C jinoo tacae ayat sa tarawe keu Waki Daerah Awaknya geupilih tiep-tiep provinsi teuntee meulalui pemilu nyang sah Ayat keudua di Waki Daerah dalam wilayah tie-tiep provinsi jumlah jih sama bek le meutamah bek sampe salah ka dumnann bagi

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. ***)

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)

Padum na Waki sicara jumeulah bak tiep daerah jumlahjih sama Bak tiep provinsi hitongan bek salah meunan geusurah tpham beurata

Siluruh jumlah sinoe geupeuthee bek leubeh bagi lhee bak Waki Rakyat Domnan jumlah atoran meulakee ka lheueh geupeuteuntee di dalam ayat

Ayat keulhee keu watee duek sidang tiep thon kadang geucok kutika Sithon sigo sidang geurancang meunyo tan teuhalang geupeuduek acara

Ayat keupeuet susonan geupeugah kedudukan geupeusah pakrikuh cara Ngon undang-undang bandum geurambah bek salah langkah ngon hukom negara

Pasal 22D

Pasai duaploh dua D jinoe tasimak ayat talacak na dua peukara Keu Waki Daerah tugaih geupeujak lam ayat sa takuwak laju tabaca

Waki Daerah gopnyankeuh peujok rancangan geupeutrok bak Waki Rakyat Hase rancangan nyang ka geureumbok nyang ka geurok di dalam rapat

Asoe geubahaih dalam rancangan nyang na kaitan ngon otonomi Pusat ngon Daerah pakri hubungan daerah beuntukan beugeutem akui Meunancit bagoe suai pemekaran daerah gabongan pakrikuh cara Daerah geugabong sidroe pimpinan beumeupeue alasan watee geupareksa

Keu sumber daya pih jeuet geurawi alasan geucari beujeuet keulola

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Sumber daya alam ngon ekonomi
beumudah raseuki makmu negara

Teuma ngon peng pih jeuet kaitan
teuntang keuangan suai beulanja
Pusat ngon daerah beusabe timbangan
beuna sipadan nibak neraca

Lam ayat keudua geuulang peugah
meupeue geukisah dalam ayat keusa
Tapi di sinoe keu Waki Daerah
beuphui langkah ikot sireuta
Beugeutem ikot di dalam rapat
le Waki Rakyat sidang geupeuna
Bandua pihak silang pendapat
salah geuralat geuceugat nyang beuna

Geuikot sireuta watee geubahaih
turot geupeujeulaih asoe geurika
Turot geusimak kadang pih peue bhaih
kadang han sep kaih beulanja negara

Silaen geupeujeulaih geubri alasan
sibagoe pertimbangan keu Waki Rakyat
Mangat geususon dalam rancangan
anggaran pendapatan deungon beulanja

Atawa geurancang saboh atoran
miseue kaitan ngon pajak negara
Atawa rancangan teuntang pendidikan
silaen nibaknyan miseue agama

Dalam ayat lhee na hak geubri
Waki Daerah awasi geutron lapangan
Pakri geupeulaku nyang ka lheueh geurawi
na hak geuungki meunyo tan sipadan

Bila seuleusoe gopnyan awasi
laporan geubri keu Waki Rakyat
Mangat geutimang ngon geutindak lanjuti
bek sampe teureunti hase lam rapat

- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. ***)

- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan dan pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)

- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VIIB*)** **PEMILIHAN UMUM**

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***)

Dalam ayat peuet suai geupeupiyoh masaalah geupeujatoh Waki Daerah Ngon undang-undang bandun geuteumpoh syarat beutatroh cara pih beusah

BAB VIIB **PEMILIHAN UMUM**

Bab tujuh B jinoe tatuleh keu suai meumileh sinoe geurika Nyankeuh Pemilu singkat tatuleh atoran geureh ukeue tabaca

Pasal 22E

Pasai duaploh dua ngon E geusambang nam ayat tahitong bandum ube na Dalam ayat nyan asoe jikandong dalam ayat sa tatamong mula pertama Pemilu geupegot meumileh langsung ngon umum geuhubong bebaih rahsia Jujo ngon ade teuma meuseumong watee geuhitong limong thon masa

Dalam ayat dua meusoe geupileh nyang phon geureh keu Waki Rakyat Waki Daerah pih meunan meunceh ka meunan geugareh di dalam ayat geupileh Presiden teuma geuseubot Wakigeuh geuikot turot sireuta Waki Daerah teuma nyang keu syot nyang paleng di likot geuseubot nama

Ayat keulhee peserta geupeugah Dewan Rakyat geupeusah meusoe anggota Meunancit anggota Dewan Daerah lam politek geupeusah beuna bandua

*) : Perubahan Pertama
) : Perubahan Kedua
) : Perubahan Ketiga
) : Perubahan Keempat

- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***)
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. ***)

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung-jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***)
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)

*) : Perubahan Pertama
 **) : Perubahan Kedua
 ***) : Perubahan Ketiga
 ****) : Perubahan Keempat

Ayat keupeuet keu Dewan Daerah anggota geupeugah sinoe geumuproe Padum geupileh anggota nyang sah hana jumlah tapi sidroe-droe

Ayat keulimong pemilu soe puga geutunyok panitia saboh komisi Meusifeuet nasional umum meurata teutap lom teuma deungon mandiri

Ayat keunam ukeue tarika undang-undang geupeuna alat seunipat Atoran lanjutan bek sampe cupa bek sampe ceudra amanah rakyat

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

Bab keulapan teuntang keuangan duaploh bilangan pasai tabaca Ayatjih na lhee sibagoe rincian suai keuangan bandum geurika

Ayat nyang phon teuntang anggaran teuntang pendapatan beulanja negara Sibagoe wujud nibak pengelolaan teuntang keuangan pakrikeuh cara

Anggaran pendapatan deungon beulanja teuntang keuangan negara pakri geusatoh Sithon sigo geupeutron keunira undang-undang geurika bandum beumeutoh Bandum tapubuet sicara teubuka tanggung-jaweueb sineuna bek teuka cacat Bandum anggaran pendapatan beulanja bandum tapeuguna keu makmu rakyat

Ayat keudua rancangan anggaran deungon pendapatan nyang ka teusurat Uleh Presiden gopnyan ajukan geupeuna bahasan ngon Dewan Rakyat

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. ***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. *****)

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. *****)

Akan tetapi walee pih meunan beugeungieng alasan Waki Daerah Meupeue meukeusud deungon tujuan meupeue permintaan sinan geucurah

Ayat nyang keulhee di Waki Rakyat hana sipakat usui Presiden Maka Presiden geutueng meuneumat anggaran nyang lewat mantong geureken

Pasal 23A

Pasai duaploh lhee A pajak kutepan meungandong di sinan sifeuet teupaksa Bandum ngon undang-undang geuboh atoran keureuna keupentingan keu aneuk bangsa

Pasal 23B

Pasai duaploh lhee B geurawe keu peng macam pih peunteng deungon hareuga Ngon undang-undang atoran geupateng bek taanggap enteng rugoe meubura

Pasal 23C

Pasai duaploh lhee C laen nibak nyan suai lanjutan anggaran beulanja Ngon undang-undang geupeugot hitongan beumeuri di sinan rugoe ngon laba

Pasal 23D

Pasai duaploh lhee D beuna saboh bank beugot geurancang milek negara Pakri geususon neuduek beureumbang pakri wewewenang bak boh keunira

*) :Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
*****) : Perubahan Keempat

BAB VIII A *)**
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. ***)

- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***)

- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. ***)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

BAB VIII A
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 23E

Jinoe takisah pasai tujuh A
keu Badan Pemeriksa suai Keuangan
Kadang geusingkat deungon BPKa
tatuho rakata dalam tulesan

Pasai duaploh lhee E jinoe rincian
ayat bilangan dijih na dua
Ayat sa dilee taeu pakriban
meupeue kandungan asoe geurika

Meusoe pareksa lam pengelolaan
tanggung-jawueub pin saban suai beulanja
Maka geubeuntuk simacam Badan
Pemeriksa Keuangan geurasi nama

Maka badan nyan beuna tatukri
bebaih mandiri teukanan bek na
Bek na peungaroh sama sikali
teukad beukawi bek ek jigoda

Ayat keudua hase geuseurah
keudeh geulangkah bak bak Dewan Waki
Di likot nibak nyan bak Waki Daerah
keunan geulimpah hase teuliti

Seusuai ngon wewenang hase geulimpah
bek sampe meuruwah jile u luwa
Meunurot keududukan tinggi ngon reundah
meunurot geurambah hase pareksa

Ayat nyang keulhee hase teuliti
geutindak -lanjuti uleh lembaga
Kadang cit badan silaen Waki
undang-undang teuliti bandum peukara

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***)

- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.***)

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.***)

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23F

Pasai duaploh lhee F ayat sa mulai keu BPKa seundiri anggota geupeugah Anggota geupileh le Dewan Waki deungon geupeurati Dewan Daerah

Anggota geupileh bandum seuleusoe jinoe geupeutoe bak keupala negara Ubak Presiden laju geumuproe neuresmi le jinoe anggota BPKa

Lam ayat dua meusoe pimpinan geupileh lam kawan nibak anggota Sabe keudroe-droe geupeuna pilehan geucok hitongan nyang le suara

Pasal 23G

Pasai duaploh lhee G kisah keu teupat beumupat alamat lembaga BPKa Di ibu kota sideh di pusat teupat meusapat ahli pareksa

Badan BPKa geupeudeuk waki tiep-tiep provinsi geutunyok teunaga Teunaga geupeudeuk teuntee nyang ahli nyang beurani selidiki anggaran negara

Ayat keudua ketentuan lanjutan suai atoran badan BPKa Ngon undang-undang geuboh ukoran sibagoe peudoman ureueng keurija

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24

Bab sikureueng teuntang kekuasaan suai keuhakiman hukom beuade Lam pasai dua-peuet meunurot urotan lhee ayat di sinan asoe geurawe

Dalam ayat sa kekuasaan kehakiman bek na tekanan tapi mardeka Hukom geupeujak lewat peradilan beuteudong keuadilan siumu masa

Ayat keudua kehakiman nyang lambong Mahkamah Agung nyang mat kuasa Peradilan di yup nyan geuseubot langsung meutoh geuhitong taseubot nama

Peradilan umum nyang phon geuseubot lam tulesan beurikot peradilan agama Peradilan militer geukheun meuturot peradilan keu syot tata usaha negara

Kalimat 'oh lheueh nyan geutuleh ngon dan meuhubong ngon badan u likot neulisi Teuma geutuleh oleh le kaman Mahkamah saban ngon Konstitusi

Jadi Mahkamah na dua badan nyang phon seubotan Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi laen nibak nyan ukeue neuteuliti pakri meuhubong

Ayat nyang keulhe sigala badan nyang na kaitan fungsijih sama Sabe kuasa lam suai kehakiman undang-undang peusaban bak mat kuasa

Pasal 24A

Pasai duaploh peuet A jinoe tasinggong ayatjih na limong ukeue tabaca Dalam ayat sa Mahkamah Agung

undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. ***)

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***)

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***)

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. ***)

meupeue geutanggung ukeue tarika Mahkamah Agung meupeue wewenang peukara geusidang tingkat kasasi Di sinoe geuji hubungan undang-undang antara meunentang deungon seurasi

Atoran undang-undang di sinoe geujoe geubalek-baloe geupham ngon makna Ngon undang-undang toh atoran geuhiroe awai ngon dudoe laku ngon hana Gopnyan miliki wewenang nyang laen geutueng seunalen bak undang-undang Atoran Hakim agong leupah permanen kon meuen-meuen bak hukum negara

Ayat keudua beuna taturi hakim agong miliki integritas nama Pribadi gopnyan beujeuet tauji nyang hana gop caci deungon diceula

Bak cok putosan ade ngon ahli ka jeuet keu profesi sidang peukara Cukop peungalaman bak ngieng bukeuti lam hukum gop turi meusyuehu nama

Ayat lhee calon hakim agong geusudi geusui le komisi meuhu alamat Komisi Yudisial usui beugeubri ubak Dewan Waki geulakee pendapat

Meunyo geuseutujui lagee geuharap alasan ka leungkap tan pat geudawa Ubak Presiden laju geuhadap hakim agong geupeuteutap lagee geumita

Ayat keupeuet Mahkamah Agung geupileh langsung keutua ngon waki

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ***)

- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. ***)

Ngon sabe anggota meusoe nyang keunong
meunurot geuhitong suara geubri
Ayat keulimong teuntang susonan
teuntang keududukan Mahkamah Agong
Peureulee geuato troh bak keunan
meunyo han pakriban hukom tajunjong

Hukom acara meunan cit saban
ngon peradilan bawahan haroih geutata
Ngon undang geuboh atoran
meunyo han meunan hanjeuet keurija

Pasai dua-peuet B badan Komisi
kisah mulai nibak ayat sa
Komisi Yudisial nama geurasi
kayem Komisi nama geurika

Badan Komisi meusifeuet mandiri
beugeudong seundiri bek sampe meukat
Wewenang gopnyan usui beugeubri
hakim agong geucari untuk geuangkat

Wewenang Komisi laen nibak nyan
geujaga kehormatan hakim seundiri
geujaga akhlak martabat pih meunan
keulakuan pih saban bek roh jicaci

Bandum hakim gopnyan awasi
rendah ngon tinggi geujaga amanat
Peukara geusidang ngon niet nyang suci
bek teuka beunci deungon khianat

Ayat keudua anggota komisi
ileumee ahli lam lam bidang hukom
Beule pengalaman integritas diri
bek na deungki ngon hana muphom

Pribadigeuh got cukup bako
hana kuto ngon teuceula
Gopnyan tanggoh hana leuho
han ek jicako bak nyang beuna

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24C

- (1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)

Ayat keulhee anggota komisi geuangkat seundiri le Presiden Teutapi beugeutem seutujui le Dewan Waki beugeutem reken

Ayat keupeuet teuntang susonan teuntang kedudukan anggota komisi Ngon undang-undang geuboh atoran mangat bek goyang badan yudisi

Pasal 24C

Pasai duaploh peuet C jinoo tarawi Mahkamah Konstitusi mantong peutrang Dalam nam ayat atoran geurinci ayat sa tamulai meupeue wewenang

Mahkamah Komisi geubri wewenang peukara geusidang phon ngon akhe Putosan ka final hana soe goyang hana soe teuntang putusan ka mate Peukara undang-undang gopnyan geuujoie atoran meubagoie gopnyan pareksa Bak undang-undang dasar keudeh geupuwoe geulhoh sinaroe bandum peukara

geupeuputih sengketa antara wewenang meusileh silang lembaga negara Bak undang-undang dasar asai pegangan meunurot tafseran hukom ka beda

Gopnyan peububar peureute politek meunyo geutilek alasan ka teupat Meunyo pemilu meuseuliseh ngon licek keuputusan geutarek lagee jigugat

Ayat keudua Mahkamah Konstitusi putusan beugeubri keu Dewan Rakyat Dewan teumanyong deungon seumudi Presiden ngon Waki geulakee peundapat

Dewan geuduga Presiden ngon Waki meunurot dali ka jeuet tagugat

*) : Perubahan Pertama
 **) : Perubahan Kedua
 ***) : Perubahan Ketiga
 ****) : Perubahan Keempat

(3). Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. ***)

Gopnyan meulangga ngon UUD seundir putosan geusudi le Dewan Rakyat

Ayat keulee Konstitusi tameuproe na sikureueng droe jumlah anggota Presiden peuteutap bandum ureueng nyoe lon kheun jinoo meusoe nyang mita

Lhee droe ureueng bak mahkamah Agong lhee droe geutanggung le Waki Rakyat Lhee droe treuk Presiden peutamong sikureueng tahitong jumlah anggota

Ayat keupeuet keutua geupileh waki geurinteh sisama anggota Sisama hakim meunan geugareh geuhitong ka meunceh meunurot suara

Ayat keulimong hakim konstitusi haroih geumiliki integritas nama Meunancit tingkah laku ngon harga diri nyang bek jicaci deungon diceula

Sikap beuade negarawan pih meuhi ahli konstitusi ngon tata negara Bek geumat jabatan kurusi hana geuasi peujabat negara

Ayat keunam hakim konstitusi di sinoe geurawi pakri geuangkat Meunan cit lom meunyo geupeubeureunti cara geucari atoran beumeupat

Meunancit lom keu hukom acara keu cara keurija bak Konstitusi Ngon undang-undang atoran geurika bek sampe cupa atoran geubri

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA) WILAYAH NEGARA**

Pasal 25A**)**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. **)

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 25

Pasai duaploh limong geuato syarat hakim taangkat pakrikuoh cara Meunancit geupeupiyoh jatoh bak pangkat undang-undang peuteupat bandum peukara

BAB IX A WILAYAH NEGARA

Pasal 25A

Bab sikureueng A geutamah keu suai wilayah dalam negara Pasai dua ploh limong A asoe geupeugah tacok ngon surah tapham ngon makna

Negara Kesatuan nama ka meugah Republik ka geusah Indonesia Negara meupulo ngon le sileupah tanda pih leumah bak nusantara

Meutoh wilayah sireuta ngon bataih hak-hak beujeulaih milek negara Ngon undang-undang bandum geupeusah bek salah peguah tanyoe po atra

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

Jinoe tatamong lam bab keusiploh atoran geuboh keu warga negara Teuma Penduduk bandum beumeutoh pasai dua-nam tateuoh meupeue calitra

Warga negara ureueng ka meusoe penduduk lam nanggroe sinoe geurika Peuereulee geuato deungon geuhiroe mangat bek paloe ngon sabe bangsa

Lam ayat keuphon beuna tatukri beuna taturi keu warga negara Nyankeuh bangsa Indonesia asli nama geurasi seujak mardeka

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **)

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. **)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

Bangsa laen nyang ka trep domisili geumita bukti beujeuet keu bangsa Ngon undang-undang bukti geucari mangat geuasi hubungan syedara

Ayat keudua penduduk taturi warga sendiri Indonesia Di ureueng aseng teuma geuasi nyang ka domisili keunoe jiteuka

Ayat keulhee warga negara penduduk pih sama pakri geuato Ngon undang-undang bandum geurika hubungan syedara bek sampe hanco

Pasal 27

Pasai dua-tujuh kisah tatamong ayat jikandong na lhee peukara Ayat pertama laju tasinggong wajib tatamong hukom nyang sama

Bak mat peurintah meunancit muphom di keue hukom bek rhot keu beda Ngon popeurintah beutatem meuhubong beutatem dukong bak buet nyang beuna

Lam ayat keudua asoe talacak bandum geubri hak keu warga negara geubri deungon buet udep beulayak sibagoé khalayak insan sineuna

Ayat keulhee warga geubri hak wajib ngon layak tabila bangsa Teukeudi musoh geutanyoe jigasak nyawong tapeusak nanggroé tabila

Pasal 28

Pasai dua-lapan jinoe tacatat mardeka meusyarikat sineo geurika Mardeka seumike ngon bri pendapat bek sampe meuilat tahujat bangsa

BAB XA)**
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **)
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **)

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Mardeka seumeugah deungon seumurat undang-undang peuteupat beugot negara Bak buet nyang jroh bek roh taupat bek 'oh tagugat hujjah ka hana

BAB XA
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Bab siploh A keu hak asasi beuudep seurasi dum manusia Antara sisama beusaleng hargai beuudep abadi aman seuntosa

Pasai duaploh lapan A sinoe geusisep geubri hak udep keu tiep-tiep ureueng Hak peutheun droe bek sampoe tapeubep beudep tuereutep bek sape kengkeueng

Tiep-tiep ureueng di sinoe tasimak bandum geubri hak udep lam donya Hak peutheun droe meubagoe curak keuhidopan nyang layak bak manusia

Pasal 28B

Pasai duaploh lapan B keu rumoh tangga hak keularga beuna turonan Tameukawen beusah bek ngon zina bek sampe sama insan ngon hewan

Lam ayat dua aneuk nyang lahe beuudep sare sibagoe insan Beutatem peulara deungon meusampe beusipeunoh hate tabri lindongan

Bek sampe tapoh deungon binasa bek sampe taseksa lam kekerasan Bek na diskriminasi ngon tipee daya bek sampe ceudra lam keuhidopan

Pasal 28C

Pasai duaploh lapan C kisah ka sampoe geukisah keuasoe lam dua ayat

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.**)

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Teuntang hak asasi suai droe-keudroe pakri tahiroe bek sampe meularat Ayat keu sa suai hiroe droe tasatoh droe-keudroe beuna tatukri keubutuhan pokok beugeutem pakoe beugeutem meureunoe ileumee geucari

Tatuntut ileumee beuna manfa'at bak buet geuhemat ngon teknologi Beulahe seuni meubagoe bakat budaya masyarakat deurajat beutinggi

Kualitas udep beuek meuningkat tujuan tatakat udep sijahtra Beutatem berjuang keu maju umat beujitron beureukat keu manusia

Ayat keudua na hak maju beugeutem tuju ikot sireuta Ikot berjuang keudroe meubantu beusare ngon makmu sabe syedara

Sabe masyarakat beuudep sikuphu beusama maju ngon sabe bangsa Mangat membangun saleng membantu maksud tatuju keu saboh negara

Pasal 28D

Pasai dua ploh lapan D jinoo gileran na hak pengakuan dalam ayat sa Teuma hak jaminan ngon perlindungan dalam hukom atra nyan na hak tamita

Kepastian hukom meunancit sabe hukom beuade lam sidang peukara Di keue hukom bandum beusare bek meutuka take atoran hana

Lam ayat keudua na hak keurija meubagoe usaha deungon imbalan Geupeulaku beuade layak ngon rata bek na anianya deungon paksaan

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)

Bek na teukanan lam hubungan keurija
bek sampe ceudra bak cok tindakan
Bek sampe putoh hubungan usaha
hubungan bek bla ngon sabe insan

Lam ayat keulhee na hak geucari
kesempatan geubri bandum beusama
Dalam memerintah bandum geuasi
jalan geulisi pakri geuteuka

Ayat keupeuet keu hak teumpat dong
alat ngon sokong warga negara
Status warga peureulee geupeukong
bek sampe jitodong ureueng ban teuka

Pasal 28E

Pasai dua-lapan E bebaih geutamong
agama geuteurimong dalam ayat sa
Bebaih geuibadat agama meukeunong
meutoh geusokong gopnyan peucaya

Bebaih geupileh bidang didekan
sireuta pengajaran meutoh geuhawa
Bebaih geupileh meubagoe pekerjaan
sireuta kewargaan meutoh negara

Bebaih geupileh teumpat domisili
pat laen geucari lam bataih negara
Atawa geuwéh hana soe halangi
geulang keumbali halangan hana

Geutanyoe bek reutak lam saboh agama
ngon keyakinan di luwa sampe ku'eh
Ka meunan geuato uleh negara
bek saboh bangsa geutanyoe meukr'eh

Lam ayat keudua na hak peucaya
keyakinan meubeda nyang toh geupileh
Seumike ngon sikap bandum mardeka
ngon niet lam dada hateteuh beugleh

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Ayat keulhee na hak meusyarikat
bebaih meusapat bak buet nyang beuna
Meunancit hak peuteubiet pendapat
meubek tahuajat nyang hana hana

Pasal 28F

Pasai dua-lapan eF keu komunikasi
keu saleng meuturi dalam ayat sa
Silaen nibak nyan na hak informasi
na hak miliki meuteumee beurita

Betatem peukeumang hak informasi
bagi pribadi sireuta lingkungan
Lingkungan sosial udep seurasi
bak saleng meuturi beugot hubungan

Hak informasi beutatem mita
beutatem usaha jeuet takeubah
Jeuet tamiliki le that guna
bak saboh masa jeuet taulah

Na hak peutroh informasi
peuekeuh tabri ngon tapeutaba
Meubagoe saloran jeuet talalui
tapileh seundiri toh-toh nyang na

Pasal 28G

Pasai dua-lapan Ge jinoe geuhitong
na hak meulindong lam ayat sa
Tapeulindong droe bek gop todong
bek gop rong-rong rumoh tangga

Bak keuhormatan bek gop lancong
martabat meusinggong beutataba
Harta geutanyoe bek gop usong
nyang geutanyoe tanggung bek gop cuca

Meunan cit lom rasa aman
na hak lindongan bek tasurot
Bek sampe teuka meubagoe ancaman
bek na ketakutan yo lam tuot

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)

*) : Perubahan Pertama
 **) : Perubahan Kedua
 ***) : Perubahan Ketiga
 ****) : Perubahan Keempat

Tapubuet ngon han na hak pileh tabaca beuabeh tapham makna Nyankeuh hak asasi tapham beuareh hikmah tarinteh tacok seumpeuna

Ayat keudua bebaih siksaan bek na perlakuan reundah deurajat Bek roh tahina dum aneuk insan bek na tindakan rhot martabat

Lam politek na hak suaka meunyo dianianya lam nanggroe droe Laju taplueng bak nanggroe luwa lindongan tamita bek meupaloe

Pasal 28H

Pasai dua-lapan Ha dalam ayat sa hak udep sijahtra lahe ngon baten Teumpat tinggai ngon hak usaha alamat hana beubek mungken

Teuma lingkungan udep beumangat teumpat beusehat kumuh beubek na Meunyo saket na hak rawat beuna ubat lagee geumita

Lam ayat keudua udep beumudah bek sampe susah udep beusare Tapeulaku khusus deungon tapapah nyang ka menyerah bak hana hase

Beuna peluang deungon manfaat bak cok rahmat bak buet nyang sama Supaya teurasa sama derajat ade pih meuhat sare meurata

Dalam ayat lhee na hak jaminan sosial bak insan saleng meungikat Sabe saudara handai ngon taulan sabe rakan deungon keurabat

- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. **)

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Deungon na jaminan mungken sikali
pengembangan diri maken sempurna
Sibagoe manusia beuna taturi
hamba Ilahi meumartabat

Dalam ayat keupeuet na hak miliki
milek pribadi han jeuet jigoe-goe
Hanjeuet jicok beurangkakri
han jeuet jitaki le barangkasoe

Pasal 28I

Paesai dua-lapan I i sa lon sisep
na hak udep ngon bek seksa
Na hak mardeka han jeuet tapeubep
pikiran beusep bak boh keunira

Na hak meurasa ngon ate nurani
bek taungki hak agama
Jipeulamiet na hak anti
na hak pribadi di keue hukom

Bak dasar hukom tan hak tuntot
nyang berlaku surot meunan bagoe
Nyankeuh hak asasi ka teuseubot
han jeuet jireubot le beurangkasoe

Dalam ayat keudua na hak bebaih
hana pantaih diskriminasi
Sigala teukanan bandum tan paih
bandun ka jelaih hak asasi

Bandum ureueng na hak meulindong
bek sampe keunong diskriminasi
Lam diskriminasi udep teupasong
ka brok untong hamba Ilahi

Ayat keulhee beutatem horeumat
identitas masyarakat meunurot budaya
Bak maseng daerah mumat bak adat
bek roh tahunyat deungon taceula

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Meunurot jameun geutanyoe kembangkan bak sagai adat nyan takheun ka basi Bek sampe menyalahi ngon peradaban beuna keumajuan sinan tacari

Ayat keupeuet meusoe peulaku peulindung peumaju bak soe geuseurah Tanggong-jaweueb negara sinan geubuhu teurutama geutuju bak popeurintah

Meusoekeuh peudong di hak asasi meusoe peunuhi sireuta geutanggung Nyankeuh negara meunyo tasudi popeurintah seundiri haroih geutampong

Ayat keulimong cara geupeudong ngon cara geulindung di hak asasi Meunurot negara hukom meunan geudukong tulong-meunulong lam demokrasi

Maka bak geupeujak hak asasi jaminan geubri deungon geuato Ngon undang-undang bandum geuungki atoran beukawi bek na teulanjo

Pasal 28J

Pasai dua-lapan Je jinoe tarawi ayat sa sendiri dilee taradat Mantong geupeugah keu hak asasi beugot taturi bek sampe tan mupat

Tiep-tiep geutanyoe wajebeu tahoreumat meusoe nyang mumat bak hak asasi Ureueng laen bek sampe tahuajat dalam geuhajat keu udep beurasi

Beumeuato udep rata jeuep teupat dalam masyarakat sireuta ngon bangsa Sehingga geutanyoe sapeue sipakat tujuan ka meuhat beuteudong negara

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)

BAB XI A G A M A

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat keudua cara keurija di hak asasi wajib tata'ati meutoh batasan
Lam undang-undang ketetapan ka kawi tujuan ka geubri sireuta jaminan

Jaminan geuangkee deungon geuhoreumat bek sampe tahunyat hak ureueng laen
Di gop pih bebaih meupeue geuhajat geupeunuhi darurat kon meuen-meuen

Bak geubri keubebasan haroih beuade bek sampe meuruge atoran akhlak
Ngon nilai agama bek meutuka-take bek le rameune ubak hana hak

Meunancit keuamanan baten ngon lahe beuteureutep sabe lam udep meusapat
Masyarakat demokrasi beuek meusampe bek sagai cre-bre saleng meugugat

BAB XI A G A M A

Bab keusiblah tapeugah langsung agama geulindung uleh negara
Duaploh sikureueng pasai tahitong ayat jikandong dijih na dua

Pasal 29

Ayat nyang keuphon tamumat bak kong negara geudong ateueh agama
Tuhan nyang esa geucok teupat dong tapham beukeunong taboh ngon makna

Lam ayat keudua jaminan geutanggong agama tatamong meutoh nyang suka
Meutoh tapeucaya mardeka tasokong ibadat geudorong uleh negara

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Keu bab duablah kisah tamuproe
keu peutheun nanggroe kisah tarika
Teuma keuamanan geutamah di sinpe
beuna tapakoe keu seulamat negara

Pasal 30

Lam pasai lheeploh geucatat asoe
tasimak jinoo meupeue geurika
Tapham makna taboh hareutoe
geutanyoe bek laloe bak bila bangsa

Lam ayat keuphon warga bek laloe
na hak geuhiroe peutheun negara
Wajeb geuikot bak peutheun nanggroe
usaha meubagoe bak bila bangsa

Tajaga beuaman rakyat sinaroo
bek sabe keudroe-droe tameuen panta
Meunyo teuka musoh geutanyoe jikiloe
karu lam nanggroe reuloh negara

Lam ayat keudua usaha pertahanan
sireuta keuamanan beutatem peulara
Cara geupeujak bandum atra nyan
sistem geupeunan rakyat semesta

Meunyo han mungken bandum teulibat
geuangkat aparat miseue TNI
Teuntra nasional TNI geusingkat
KNRI alamat keupada polisi

Kekuatan utama nibak awaknyan
rakyat pih sajan ikot sireuta
Tapi bak rakyat sibagoe dukongan
kareuna awaknyan hana seunjata

Lam ayat keulhee teuntra geurinci
awaknyan geubagi lam lhee angkatan
Angkatan Darat beuna taturi
tugaih geubri peutheun daratan

bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**))

- 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **))
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.**))

BAB XIII **PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)** **Pasal 31**

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Angkatan Laot nyang peuthen bahari
ula ili di dalam geulumbang
Angkatan Udara lam awan tinggi
pulang peureugi ngon kapai teureubang

Tugaih awaknya sibagoe alat
sibagoe aparat peutheun negara
Awaknyan lindong jaga ngon keutat
negara tadaulat aman seuntosa

Lam ayat keupeuet polisi geumuproe
geujaga nanggroe beuaman sabe
Teureutep masyarakat teuma geuhiroe
geulindong sinaroe bek teuka pake

Masyarakat geujaga bek saleng takat
bek saleng laknat ngon sabe kawom
Polisi layani masyarakat meularat
beurani ngon nekat geupeudong hukom

Ayat keulimong teuntang susonan
teuntang kedudukan angkatan TNI
Sireuta polisi meunan cit saban
bandua angkatan hubungan beurasi

Tatamong angkatan meupeuekeuh syarat
beujeuet keu aparat meupeuekeuh cara
Undang-undang nyang ato meupeue tahajat
atoran peuteupat meupeue tamita

BAB XIII **PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** **Pasal 31**

Bab keulhee blah pokok bahasan
suai peundidikan keu aneuk bangsa
Pasai lheeploh sa dalam hitongan
ayat rincian na lhee peukara

Tiep-tiep warga na hak geudidek
suapaya ceureudek rakyat sineuna

- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)

Warga beucarong akai beulisek
 beuteuka meunarek bak jak sikula
 Lam ayat keuphon teuma geusahkan
 hak pendidikan keu warga negara
 Warga beucarong beuna didekan
 beujeuet keu ilmuan peumaju bangsa

Lam ayat keudua wajib taikot
 wajib tapeuturot seumenjak balita
 Pendidekan dasar dilee that patot
 popeurintah geuseubot tanggung biaya

Ayat keulhee popeurintah usaha
 beugeutem laksana cara meundidek
 Pendidekan nasional keu aneuk bangsa
 tujuan utama supaya ceureudek

Ceureudek geumeukeusud beuna sijalan
 ngon keuimanan lam hukom syarak
 Deungon takawa meunan cit saban
 sireuta atoran di dalam akhlak

Warga beucarong ukeue geupandang
 keu generasi mendatang geuboh keunira
 bandum geuato ngon unang-undang
 bek sampe teuhalang meupeue reencana

Ayat keupeuet beugeutem utamakan
 anggaran pendidekan beumeudum biaya
 Duaploh persen sikureueng-kureueng hitongan
 nibak pendapatan beulanja negara

Laen nibak nyan teuma geutamah
 anggaran daerah beusaban geukira
 Supaya beupunoh lagee geuarah
 geulaksanakan beubagah beubek
 meutunda

Ayat keulimong beugeutem majukan
 ileumee peungetahuan ngon teknologi
 Beugeujunjong tinggi agama Tuhan
 sireuta persatuan bangsa seundiri

Keu maju peradaban geutem peuturot
 sijahtra pih patot geutem padoli

*) : Perubahan Pertama
 **) : Perubahan Kedua
 ***) : Perubahan Ketiga
 ****) : Perubahan Keempat

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. *****)
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. *****)

BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ***)**

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
*****) : Perubahan Keempat

Bak contoh teuladan beujitem ikot tingkah laku pih beugot ngon budi pekerti

Pasal 32

Lam pasai lhee-dua dalam ayat sa geupeumaju budaya mangat meusyeuhu Budaya nasional di Indonesia ngon peradaban donya beuek sikuphu Beugeujamin bebaih lam masyarakat budaya ngon adat beugeutem peulara Beugeutem keumbangkan lagee jihajat meutoh nyang tamat nilai budaya

Lam ayat keudua beugeutem horeumat bahasa rakyat beugeutem peulara Bahasa daerah meubagoe teumpat cukop kaya that budaya bangsa

Lam ayat keudua geuhoreumat geujaga meubagoe bahasa ureueng meututo Bahasa daerah kekayaan budaya milek bangsa bek rhot keu tilo

BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

Bab keupeuetblah keu perekonomian suai masukan beutatem usaha Ekonomi nasinal meunan geupeunan meungandong tujuan beumakmu bangsa

Yoh goh geutamah sinoe geusuai keu sijahtra sosiai kisah geurawi Angka lhee ploh lhee urotan pasai dalam limong hai ayat geurinci

Ayat keuphon ekonomi geururai geususun sibagai usaha bersama Asas kekeluargaan geucok keu bingkai laba ngon pangkai bek jeuoh that beda

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ****)
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

Ayat keudua cabang produksi
peunteng geumiliki uleh negara
Atawa khalayak di sinan raseuki
bandum keukuasai uleh negara

Tanoh deungon ie lam ayat keulhee
leumah ngon meuseubee milek negara
Keukayaan alam meunan cit lagee
hase ka teuntee keu makmu bangsa

Ayat keupeuet ekonomi geupeujak
lagee keuheundak lam demokrasi
Demokrasi ekonomi prinsip sama hak
keuadilan geusawak bak efesiensi

Laen nibak nyan beuna lanjutan
beuluwah wawasan deungon mandiri
Beugot geujaga beusabe timbangan
beuna kemajuan lam ekonomi

Beuna keusatuan deungon sipakat
bek sampe meularat dalam usaha
Bak ekonomi nasional beuek takarat
beuna teurikat ngon sabe bangsa

Ketentuan laen leubeh lanjot
bak pasai di likot ka lheueh geurawi
Ngon undang-undang bendum geuturot
nyang na meunyangkot ngon ekonomi

Pasal 34

Pasai lheepeuet jinoe tapuliek
ayat sa tapukiek keu ureueng papa
Fakir miskin aneuk nyang teutiek
tanggongan geupeutiek ateueh negara

Ayat keudua beugeutem keumbangkan
sistem jaminan keu bandum rakyat

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)

- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN)**

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Jaminan sosial saleng hubungan bek na tindakan nyang ploh bak ikat

Uleh negara geumita daya geupuwoe teunaga keu masyarakat Kadang cit leumoh bek roh geuhina sibagoe manusia bek rhot martabat

Ayat keulhee tanggongan negara fasilitas geuseudia rakyat beusehat Pelayanan umum meunan cit sama patot geupeuna meunurot hemat

Ayat keupeuet ketentuan nyang laen geutueng seunalen bak undang-undang Meunurot atoran pakri ban geusyen bek meuen-meuen beukong geupacang

BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Bab limong blah tapeutron salenan Bendera di sinan deungon bahasa Lambang negara geusalen sajan lagu keubangsaan di sinoe geurika

Pasal 35

Pasai lheeploh limong teuntang bendera pakri warna sinoe geuureh Bendera resmi Negara Indonesia geurasi nama ngon mirah puteh

Pasal 36

Pasai lheeploh nam teuntang bahasa ateuh nan negara nama beumeuncheh Bahasa Indonesia meusyuehu nama narit peusama sinoe ngon sideh

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 36A

Pasai Lhee-nam A lambang negara
ticem garuda geuboh niseubah
Garuda Pancasila jithee sineuna
semboyan Bhinneka geucok hekeumah

Bhinneka Tunggal Ika geuboh tapeuse
bangsa nyang cre-bre tapi bersatu
Bandum sipakat sapeue lam hate
hana meusuwe keu teuka karu

Pasal 36B

Pasai lheeploh nam B jinoo tarawi
keu lagu resmi meupeukeuh nama
Lagu Kebangsaan beuna taturi
tapham arti tatueng ngon makna

Lagu Kebangsaan beuna tatukri
geutuang lam seuni hase mardeka
Indonesia Raya buhu ka geubri
beutatem meunyani taboh irama

Pasal 36C

Pasai lhee-nam C teuntang ketentuan
ukeue lanjutan suai bendera
Suai bahasa meunan cit saban
sireuta sajan lambang negara

Lagu Kebangsaan pakri geudendang
pakri geucanang khidmat beuteuka
Bandum geuato ngon undang-undang
atoran geurancang ukeue geurika

*) : Perubahan Pertama
) : Perubahan Kedua
) : Perubahan Ketiga
) : Perubahan Keempat

BAB XVI
PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.****)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

BAB XVI
PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37

Teuma di akhe lam bab keu namblah Undang-Undang Dasar taubah cara geupeuna Lam pasai lhee-tujuh sinan geupeugah lam ayat ka geusah syarat ngon cara Dalam ayat keuphon usui geubah pasai ka geusah pakrikuh cara Lam Undang-Undang Dasar sinan geusurah mantong jeuet geuilah lewat agenda

Agenda geusidang le Majeulih Rakyat beugeutem sipakat uleh anggota Sa bagi lhee beutroh lam rapat sikureueng-kureueng teulibat keunan geuteuka

Lam ayat keudua usui geuaju haroih gepeulaku ngon cara teutuleh Beucukop alasan pasai nyang ragu ayat nyang buntu di meuyup geugareh

Lam ayat lhee keu sidang geupeuthee jumlah meuteuntee di Majeulih Rakyat Anggota beutroh dua bagi lhee sihana-hana geulakee teuka lam rapat

Lam ayat keupeuet putosan geubah beugeutem peusah le siteungoh anggota Limongploh persen sidroe meutamah pasai ka ubah lagee geumita

Ayat keulimong keu beuntuk negara khusus geurika bek sampe meubah Negara Kesatuan Republik Indonesia bek sampe jituka meubagoe ilah

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.****)

ATORAN PEURALIHAN

Atoran peralihan jinoo takisah
atoran geupinah keu laen masa
Hana cocok le jameuen meuubah
ka le meutamah deungon meubeda

Pasal I

Dalam pasai phon aturan awai na
mantong geukira teutap berlaku
Tapi geusyarat nyang baro hana
atoran geupeuna mangat bek buntu

Meunyo ka meunan tangieng u likot
peue ka geucabot atoran ka na
Lam undang-Undang Dasar ka tan geuseubot
leupah that patot tacok nyang lama

Pasal II

Pasai keudua lembaga negara
atoran meutuka peukeuh geuakui
Meunyo nyang baro goh lom geupeuna
maka nyang lama mantong meufungsi

Pasal III

Mahkamah Konstitusi pasai nyang keulhee
pajan geuangkee haroih geupeuna
Tujohblah Agustus ka geucok watee
thon dua ribee lhee bataih kutika

Sigolom geubeuntuk meusoekueh tanggung
wewenang geujunjong le Konstitusi
Bandum geupubuet le Mahkamah Agong
mangat bek kosong geunantoe geubri

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.****)

Pasal II

Dengan ditetapkan perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.****)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

ATORAN TAMBAHAN

Atoran Tambahan 'oh akhe dudoe meupeukeuh asoe sinoe geutamah Teuntee peuleungkap sinoe geumuprooe pasai di sinoe dua geusurah

Pasal I

Dalam pasai phon Majeulih Rakyat tugaih geucatat ketetapan geubuka beugeutem tinjau materi ka lewat status pih meuh atoran ka lama

Materi hukom ketetapan nyang ka na status pih sama meunan cit bagoe Hase ketetapan Majeulih Sementara sireuta nyang geupeuna le Majeulih keudroe

Di sinoe geuato meupeue reuncana ka meujan kutika geubri ngon watee Putosan geucok sidang geupeuna bak thon nyang teuka dua ribee lhee

Pasal II

Lam pasai keudua akhe geupeugah UUD geubah geutanyoe teurimong Pembukaan ngon pasai mantong geukeubah UUD lam sjarah bak thon peuet limong

Bek le takisah keu Pembukaan bak phon salenan ka lheueh tarawe Teuma keu pasai meunan cit saban ayat di jih nyan ka le hana le

LAMPIRAN

**DAFTAR PESERTA LOKAKARYA
HIKAYAT ACEH TENTANG UUD 1945**

Grand Nanggroe Hotel, Banda Aceh, 2 - 4 Mei 2008

1. Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, S.H.
2. Dr. Faisal A. Rani, S.H.
3. Helmi Hass
4. Muhammad Nasir, S.Hi
5. Ahmad Fauzan
6. Arief Ramdan
7. Drs. Rafiuddin, S.H.
8. Bustamam, S.Hi
9. Mursyid, S.Ag., M.Hi
10. Drs. Burhanuddin A. Gani
11. Prof. Dr. Azman Ismail, M.A.
12. H. Badruzzaman, SH., M.H.
13. Mahdi Abdullah
14. Ampuh Devayan
15. Drs. H. Ramli Yusuf, M.A.
16. Dra. Munawiah, M.Hum
17. Drs. Husaini Husda
18. Dara Adila
19. Drs. Armia Ibrahim, S.H.
20. Drs. Taslim H. M. Yasin
21. Zulfan, S.H., M.H.
22. Dr. Syarifuddin Hasyim, SH.,M.Hum
23. Drs. H. M. Jamil Ibrahim, S.H.
24. Dra. Fauziah Nurdin
25. Agustina Arida, M.Si
26. Prof. Dr. H. Darwis Soelaiman, M.A.
27. Dra. Rostina Taib, M.Hum
28. Dra. Cut Trisnawati
29. Drs. Burhan
30. Dra. Hj. Rosmawardani, S.H.
31. Drs. H. Soufyan Ibrahim, M.Ag
32. Drs. Maimun Ibrahim
33. Drs. Syamsul Bahri, M.Si
34. Dr. Syamsul Rijal, M.A.
35. T. A. Sakti
36. Dr. Zulkarnaini Abdullah, M.A.
37. Drs. Munirwan Umar
38. Drs. H. Nasaiy Aziz, M.A.
39. Baun Thoib, S.Ag., M.Ag
40. Muhammad Yasir Yusuf, M.A.
41. Mohd. Siddiq, S.Ag., M.H.
42. Drs. Nurdin Ar, M.Hum
43. Dahniel, SH., M.Si
44. Armia, S.Pd., M.Hum
45. Drs. Barlian Aw
46. Muhammad T. Ismail
47. Drs. Yusri Yusuf, M.Pd
48. Feat Rusjdi, S.Sos
49. Drs. Nab Bahany As
50. Ir. Nurdin Syam

**TIM PERUMUS BIDANG SUBSTANSI
LOKAKARYA HIKAYAT ACEH TENTANG UUD 1945
Grand Nanggroe Hotel, Banda Aceh, 2 - 4 Mei 2008**

NO	NAMA PESERTA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, S.H.	Ketua
2	Dr. Faisal A. Rani, S.H.	Wakil Ketua
3	Helmi Hass	Sekretaris
4	Muhammad Nasir, S.Hi	Anggota
5	Ahmad Fauzan	Anggota
6	Arief Ramdan	Anggota
7	Drs. Rafiuddin, S.H.	Anggota
8	Bustamam, S.Hi	Anggota
9	Mursyid, S.Ag., M.Hi	Anggota
10	Drs. Burhanuddin A. Gani	Anggota
11	Prof. Dr. Azman Ismail, M.A.	Anggota
12	H. Badruzzaman, SH., M.H.	Anggota
13	Mahdi Abdullah	Anggota
14	Ampuh Devayan	Anggota
15	Drs. H. Ramli Yusuf, M.A.	Anggota
16	Dra. Munawiah, M.Hum	Anggota
17	Drs. Husaini Husda	Anggota
18	Dara Adila	Anggota
19	Drs. Armia Ibrahim, S.H.	Anggota
20	Drs. Taslim H. M. Yasin	Anggota
21	Zulfan, S.H., M.H.	Anggota
22	Dr. Syarifuddin Hasyim, SH., M.Hum	Anggota
23	Drs. H. M. Jamil Ibrahim, S.H.	Anggota
24	Dra. Fauziah Nurdin	Anggota
25	Agustina Arida, M.Si	Anggota

**TIM PERUMUS BIDANG BAHASA
LOKAKARYA HIKAYAT ACEH TENTANG UUD 1945
Grand Nanggroe Hotel, Banda Aceh, 2 - 4 Mei 2008**

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Darwis Soelaiman, M.A.	Ketua
2	Dra. Rostina Taib, M.Hum	Wakil Ketua
3	Dra. Cut Trisnawati	Sekretaris
4	Drs. Burhan	Anggota
5	Dra. Hj. Rosmawardani, S.H.	Anggota
6	Drs. H. Soufyan Ibrahim, M.Ag	Anggota
7	Drs. Maimun Ibrahim	Anggota
8	Drs. Syamsul Bahri, M.Si	Anggota
9	Dr. Syamsul Rijal, M.A.	Anggota
10	T. A. Sakti	Anggota
11	Dr. Zulkarnaini Abdullah, M.A.	Anggota
12	Drs. Munirwan Umar	Anggota
13	Drs. H. Nasa'y Aziz, M.A.	Anggota
14	Baun Thoib, S.Ag., M.Ag	Anggota
15	Muhammad Yasir Yusuf, M.A.	Anggota
16	Mohd. Siddiq, S.Ag., M.H.	Anggota
17	Drs. Nurdin Ar, M.Hum	Anggota
18	Dahniel, SH., M.Si	Anggota
19	Armia, S.Pd., M.Hum	Anggota
20	Drs. Barlian Aw	Anggota
21	Muhammad T. Ismail	Anggota
22	Drs. Yusri Yusuf, M.Pd	Anggota
23	Feat Rusjdi, S.Sos	Anggota
24	Drs. Nab Bahany As	Anggota
25	Ir. Nurdin Syam	Anggota

BIODATA PENGGUBAH HIKAYAT

I. IDENTITAS

Nama : Drs. Fuadi Zulkifli, M. Sc
Tempat/Tgl. Lahir : MT. Wakeueh, Samalanga / 1 Desember 1963
Jenis Kelamin : Laki -Laki
Agama : I s l a m
Status : Kawin
Pekerjaan : P N S
Alamat : Dusun Mns. Tuha Komplek Tgk Di Blang II
No. 17 A. Rukoh – Banda Aceh (23111)

II. PENDIDIKAN

1. MIN Matang Jareung Samalanga Lulus Tahun 1976
2. MTsN Samalanga
3. Dayah Bustanul 'Ulum Cot Seupeng Samalanga 1982 – 1985
4. MAN Samalanga Tahun 1985
5. Fak. Tarbiyah (TPA) IAIN Ar-Raniry Tahun 1992
6. American Institut of Management Studies (AIMS), Jakarta Tahun 2002

III. ORGANISASI

1. Ketua OSIS MTsN, Tahun 1980-1981
2. Ketua OSIS MAN, Tahun 1983-1984
3. Wakil Sekretaris KNPI Kec. Samalanga, Tahun 1983-1985
4. Sekretaris Remaja Mesjid Baitus Shalihin Ulee Karen Tahun 1985-1987
5. Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fak. Tarbiyah IAIN Ar-Raniry, Tahun 1989-1990
6. Komandan Yonif-II Resimen Mahasiswa, Tahun 1990-1993
7. Wakil Ketua DPD-I GM-Kosgoro Aceh Tahun 1995-Sekarang
8. Wakil Sekretaris PB- Pemuda Dayah Inshafuddin, Tahun 1995-2000
9. Komisi POLKAM DPD KNPI NAD, Tahun 2000-2004
10. Ketua Angkatan Muda MDI NAD, Tahun 2005-2010
11. Wakil Sekretaris MDI NAD NAD, Tahun 2008-2013
12. Sekretaris PDK KOSGORO NAD, Tahun 2008-2013
13. Sekretaris Jenderal DPD Koniry Tahun 2008-2013

IV. KARYA-KARYA

1. *IAIN Ar-Raniry*, Tahun 2004
2. *Hikayat Ngon Dame Aceh Ta Puga*, BRA, 2006
3. *Terjemahan dalam Pantun Melayu / Indonesia Hikayat Ngon Dame Aceh Ta Puga*, BRA Tahun 2007
4. *Terjemahan UUD 1945 dalam Nadham Aceh*, Pusat Klinik Hukum Tahun 2008
5. *Ruman Proffesor IAIN Ar-Raniry*, 2009

BIODATA PENGGUBAH HIKAYAT

1. Nama : Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
2. Tempat / Tgl. Lahir : Paleu Mesjid-Sigli, 6 Juli 1957
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Dosen Fiqh Muqarran pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry
6. Status : Kawin
 - a. Nama Isteri : Dra. Mardhiati T. Djakfar
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
7. Alamat : Jl. Utama No. 42 Dusun Lamnyong Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh
8. Orang Tua :
 - a. Ayah : Tgk. Muhammad Daud (Almarhum)
 - b. Ibu : Amansari Arsyad (Almarhum)
9. Pendidikan Terakhir : Program Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
10. Pelatihan, Seminar yang pernah diikuti :
 - a. Program Studi Purna Ulama IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
 - b. Pelatihan dan Peningkatan Tehnis Hisab Rukyat Pengadilan Tinggi Agama Aceh, Banda Aceh Tahun 1995
 - c. Pelatihan Penelitian Tenaga Edukatif IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 1997
 - d. Pelatihan Hisab dan Rukyat Tingkat Nasional Jakarta Tahun 1998
 - e. Seminar International Pengkajian Budaya Melayu, Pusat Studi Melayu Aceh Banda Aceh Tahun 2002
 - f. Kongres Kebudayaan Aceh, Aceh Cultural Institute Banda Aceh
 - g. Nara Sumber Pelatihan Penulisan Arab-Melayu untuk Dayah se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tahun 2006
11. Karya Tulis yang sudah dipublikasikan :
 - a. *Hikayat Cut Meutia Syahid Lam Prang Geulawan Belanda*, Penerbit Dinas Pendidikan Banda Aceh, Tahun 2002.
 - b. *Alih Aksara Naskah Lama : Qawa'id al Islam (Ilmu Kalam dalam Bahasa Aceh)*, Penerbit UD. Selamat Sejahtera Banda Aceh
 - c. *Sistem Penulisan Arab – Meulayu*, Penerbit Dinas Pendidikan Banda Aceh, Tahun 2003
 - d. *Implementasi Takhrij dan Kritik Sanad*, Penerbit Dinas Pendidikan Banda Aceh, Tahun 2004
 - e. *Besar Sudut Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kota Banda Aceh*, Ar-Raniry Press.

**PANITIA PENYUSUNAN
HIKAYAT ACEH TENTANG UUD 1945**

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN
KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AR-RANIRY**

Pengarah/Penanggung Jawab:
Janedjri M. Gaffar

Pengarah/Penanggung Jawab:
Dr. H. A. Hamid Sarong

Ketua:
Rofiqul-Umam Ahmad

Ketua:
Prof. Dr. Syahrizal Abbas

Sekretaris:
Syahrudin

Wakil Ketua:
Dr. Zaki Fuad Chalil, M.A.

Anggota:
Fakhrudin
Makhfud
Endrizal

Sekretaris:
Muhammad Zuhilmi, M.A.

Anggota:
Nurul Asyura, SHi.
Dara Adilla, SHi.
Zulfahmi

Pengubah Hikayat
Drs. Fuad Zulkifli, M.Sc
Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag

Catatan :

Catatan :

